

PANEL PENASIHAT INDEPENDEN TANGGUH

**LAPORAN KELIMA
TENTANG
PROYEK LNG TANGGUH**

MARET 2007

TABLE OF CONTENTS

	Page
I. Pendahuluan.....	1
II. Gambaran umum.....	3
III. Rekomendasi Pokok.....	6
IV. Perkembangan Politik.....	11
V. Konstruksi dan Tenaga Kerja.....	13
VI. Keamanan dan Hak Asasi Manusia	19
VII. Manfaat-manfaat untuk Teluk Bintuni dan Kawasan Kepala Burung.....	21
VIII. Koordinasi dengan Pemerintah Setempat dan Pemerintah Daerah.....	29
IX. Transparansi Arus Pendapatan ke Daerah	32
X. Lingkungan Hidup	36
XI. Informasi Publik.....	41

AKRONIM DAN ISTILAH BAHASA INDONESIA

adat	Kebiasaan, hukum, dan sistem penyelesaian perselisihan yang dipakai di banyak daerah di Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan – Penilaian Terpadu Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas – Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas, mitra Pemerintah Indonesia pada Proyek Tangguh
Bupati	Pimpinan / kepala daerah kabupaten
CAP	<i>Community Action Plan</i> (Rencana Kerja Masyarakat) – pendekatan program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat di desa-desa yang terkena dampak langsung.
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i> (Mekanisme Pembangunan Bersih)
CLGI/YIPD	<i>Center for Local Government Innovation</i> (Yayasan Inovasi Pemerintahan Lokal)
CTRC	<i>Papuan Conservation Training and Resource Center</i> (Pusat Sumber Daya dan Pelatihan Konservasi Papua)
DAK	Dana Alokasi Khusus (Bantuan khusus sesuai dengan peraturan otonomi daerah untuk pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur jalan, perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah lokal dan lingkungan hidup).
DAU	Dana Alokasi Umum (Bantuan umum dari Pemerintah Indonesia ke provinsi sesuai dengan peraturan otonomi daerah)
DAV	Desa yang asalnya diidentifikasi sebagai desa yang terkena dampak langsung Proyek Tangguh
DCRI	<i>Drill Cuttings Re-Injection</i> (Injeksi Ulang Serpihan Bor)
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan legislatif daerah
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif)
ELSHAM	Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
EPC	<i>Engineering, Procurement and Construction contractor</i> (Kontraktor Rancang-bangun, Pengadaan Barang dan Konstruksi)
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)

HSE	<i>Health, Safety and Environment Committee</i> (Komite Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan)
ICBS	<i>Integrated Community Based Security Program</i> (Program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat)
IFC	<i>International Finance Corporation</i> (Perusahaan Keuangan Internasional)
IJB	Provinsi Irian Jaya Barat
IMF	<i>International Monetary Fund</i> (Dana Moneter Internasional)
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	<i>Integrated Social Program</i> – unit pelaksana di dalam Proyek Tangguh dan program pengembangan ekonomi-sosial yang dikelola oleh unit tersebut.
IUCN	<i>World Conservation Union</i> (Persatuan Konservasi Dunia)
JUKLAP	Petunjuk Keamanan Lapangan
Kabupaten	unit pemerintahan tingkat II, terdiri dari beberapa kecamatan, dipimpin oleh Bupati
KJP	Kontraktor yang memenangkan tender konstruksi pabrik LNG Tangguh
Kostrad	Komando Strategis Angkatan Darat
Kota	unit pemerintahan tingkat II, terdiri dari beberapa kecamatan, dipimpin oleh Wali Kota
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> (Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali) – Rencana Kerja Pemukiman Kembali Proyek Tangguh yang menggambarkan dampak pemukiman kembali secara sukarela.
LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i> (Gas Alam Cair)
MOE	<i>Ministry of the Environment</i> (Departemen Lingkungan Hidup)
MOF	<i>Ministry of Finance</i> (Departemen Keuangan)
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
MRP	Majelis Rakyat Papua, sebuah badan perwakilan yang terdiri dari para pemimpin agama, adat dan wanita Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus
NGO	<i>Non-governmental organization</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat)
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (Organisasi Pengembangan dan Kerja Sama Ekonomi)

SBY	Susilo Bambang Yudhoyono (inisial Presiden Indonesia)
TIAP	<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i> (Panel Penasihat Independen Tangguh)
TCHU	<i>Tangguh Community Health Unit</i> (Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh)
TNI	Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Bersenjata Indonesia)
<i>Ulayat</i>	Hak-hak masyarakat tradisional setempat atas sumber daya alam
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i> (Program Pembangunan PBB)
UNIPA	Universitas Papua
USAID	<i>United States Agency for International Development</i> (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
YPK	Yayasan Pendidikan Kristen
YPPK	Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik

I. Pendahuluan

Panel Penasihat Independen Tangguh (*Tangguh Independent Advisory Panel*, disingkat “TIAP”) didirikan oleh BP untuk memberikan nasihat eksternal kepada para pembuat keputusan senior dalam kaitannya dengan aspek-aspek non-komersial Proyek LNG Tangguh (selanjutnya disebut “Tangguh” atau “Proyek”). Panel tersebut dipimpin oleh mantan Senator A.S. George Mitchell dengan anggota Lord Hannay of Chiswick dari Inggris, Duta Besar Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura. Panel tersebut bertugas memberi saran BP mengenai bagaimana Tangguh bisa mencapai potensinya sebagai model untuk pembangunan kelas dunia, dengan memperhatikan: dampak Proyek pada masyarakat setempat dan lingkungan hidup; dampaknya pada kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya; dan evaluasinya mengenai “risiko negara” (country risk) di Indonesia dan Papua.

Ini merupakan laporan Panel yang keempat. Empat laporan sebelumnya, masing-masing diserahkan pada bulan September 2002, November 2003, Februari 2005, dan Maret 2006, lengkap dengan tanggapan dari BP, dapat diperoleh dari Panel atau situs web BP.¹ Pada bulan November 2006, Panel melakukan perjalanan panjang lagi ke Indonesia dengan mengunjungi lokasi LNG, desa-desa di Teluk Bintuni, kota Babo, ibu kota kabupaten di Bintuni, dan kota Jayapura, Manokwari dan Jakarta. Panel bertemu lagi dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara luas, termasuk banyak penduduk desa dan para pemimpin desa di Desa-desa Yang Terkena Dampak Langsung (“DAV”) di pantai utara dan selatan Teluk Bintuni; para pejabat setempat dari Bintuni dan Babo; para pemimpin pemerintahan di Jayapura dan Manokwari, dan Jakarta; Bupati dan fakultas-fakultas Universitas Cendrawasih di Jayapura; para

¹ Situs web BP adalah www.bp.com/indonesia. Komunikasi langsung dengan Panel dapat dilakukan melalui email ke tiap@tangguh.net

perwakilan badan-badan donor, termasuk Bank Dunia, the International Finance Corporation (“IFC”), the United States Agency for International Development (“USAID”) and the United Nations Development Programme (“UNDP”); Duta Besar AS dan Inggris untuk Indonesia; dan para kontraktor BP di Proyek tersebut.² Panel menggunakan jasa penasihat hukum independen, yang diberi akses penuh terhadap semua informasi yang dimintanya serta kebebasan penuh untuk mengadakan penyelidikan dan melaporkan penemuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang mereka susun sendiri.

Panel sekali lagi mempertimbangkan aktivitas-aktivitas BP dalam kaitannya dengan norma-norma global yang paling dihormati yang membentuk praktek-praktek terbaik untuk proyek-proyek di negara-negara berkembang, yang terus berubah. Hal ini meliputi Deklarasi Universal tentang HAM (*the Universal Declaration of Human Rights*); Norma-norma PBB mengenai Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dan Perusahaan Lain berkenaan dengan Hak-Hak Asasi Manusia (*U.N. Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*); Pedoman untuk Perusahaan Multinasional (*Guidelines for Multinational Enterprises*) OECD; Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Suku-suku dan Masyarakat Terasing di dalam Negara-negara Berdaulat (*the International Labour Organisation Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*); Petunjuk Operasional Bank Dunia tentang Kepedulian terhadap Masyarakat Terasing (*the World Bank Operational Directive with respect to Indigenous Peoples*); dan Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia AS-Inggris (“Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan”) (*US-UK Voluntary Principles on Security and Human Rights (the “Voluntary Principles on Security”)*)

² Daftar orang dan lembaga yang dimintai pendapatnya oleh Panel selama periode kerjanya sejak 2002 terbuat di Lampiran 1.

Panel tidak meninjau kepatuhan BP dengan hukum Indonesia dan hukum setempat, namun telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban BP di bawah AMDAL (yang mengatur kewajiban-kewajiban sosial dan lingkungan hidup), Program Sosial Terpadu (“ISP”) dan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (“LARAP”).³ Dalam rapat-rapat Panel dengan para pejabat pemerintahan setempat, daerah dan nasional, tidak terdapat isyarat bahwasanya BP tidak bertindak sesuai dengan semua kewajiban hukumnya, termasuk komitmennya terhadap AMDAL, ISP dan LARAP.

II. Gambaran Umum

Ada dukungan yang luas bagi Proyek di tingkat nasional dan di kalangan warga Papua. Panel telah bertemu dengan banyak Menteri dan para pejabat pemerintahan nasional Indonesia (“GOI”) lainnya. Beberapa mengajukan keluhan tentang aspek kinerja BP hingga saat ini. Para pemimpin nasional melihat manfaat ekonomis dari investasi asing langsung yang besar ini.

Di tingkat regional, juga ada dukungan yang kuat, namun ada harapan-harapan yang tinggi untuk memperoleh manfaatnya dan ada keluhan-keluhan tentang isu-isu khusus. Meskipun beberapa pejabat tidak berpengetahuan luas, namun baik Gubernur Papua maupun Gubernur Irian Jaya Barat (“IJB”) melihat adanya manfaat ekonomi serta peluang-peluang bagi warga Papua. Keberadaan IJB sekarang ini merupakan sebuah kenyataan praktis.⁴ BP harus mendukung komunikasi yang lebih baik dengan IJB dan pembangunan kapasitas IJB sebagai

³ Kewajiban BP di dalam LARAP telah dikaji secara rinci oleh Panel Pemukiman Kembali, yang laporan terakhirnya dapat diperoleh dari situs web BP. Lihat Professor Dr. Michael Cernea, “Report of the External Monitoring Panel on LARAP Implementation Performance in the Tangguh Project,” 15 Mei, 2006. Dr. Cernea akan menyerahkan laporan akhirnya tentang pemukiman kembali ke to BP pada tahun 2007.

⁴ Gubernur dan DPRD provinsi telah mengambil langkah-langkah untuk mengganti nama provinsi tersebut menjadi “Papua Barat.” Panel mempunyai pemahaman bahwa terhitung sejak waktu laporan ini dibuat proses perubahan nama ini terus berlangsung. Karena proses ini belum selesai, laporan ini akan menyebut provinsi tersebut sebagai IJB.

prioritas dan memberikan perhatian yang sama kepada pemerintahan yang baru ini dengan yang diberikannya kepada provinsi Papua.

Bupati Teluk Bintuni yang baru saja terpilih sangat mendukung Proyek tersebut dan melihat peluang-peluang yang dibawa Proyek tersebut bagi masyarakat Papua. Dia menyatakan dengan tegas bahwa program-program yang memberi layanan publik di kabupatennya dijalankan oleh pemerintahnya, bukan oleh BP.⁵ Namun demikian, pemerintahannya yang baru saja dibentuk belum mampu memberikan layanan dalam banyak bidang dengan cepat. Hal ini telah menimbulkan keluhan-keluhan dari dan ketegangan di kalangan para penduduk desa Teluk Bintuni yang tidak sabar, meskipun mereka telah melihat manfaat-manfaat nyata dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sementara; namun sebagian dari mereka menuntut manfaat-manfaat lain, seperti perumahan, pengadaan listrik, jalan dan infrastruktur lain. Banyak warga desa pantai utara pada khususnya, belum merasakan manfaat yang cukup dari proyek tersebut dan oleh karenanya tidak puas. Saat ini BP tidak boleh puas dengan kemajuan yang ada dalam masyarakat-masyarakat ini. Diperlukan upaya-upaya yang lebih besar baik untuk memberi manfaat-manfaat kepada masyarakat-masyarakat ini dalam jangka pendek dan untuk menyampaikan dampak positif Proyek di teluk Bintuni dalam jangka panjang guna menghindari insiden-insiden di masa depan.

Banyak pejabat Papua – termasuk kedua Gubernur – menyatakan harapan bahwa satu warisan Tangguh yang abadi adalah pengangkatan warga Papua ke tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, yang memungkinkan warga Papua tidak hanya berhasil dipekerjakan di Tangguh, tetapi juga mewakili wilayah tersebut di proyek-proyek dan aktivitas di seluruh Indonesia dan dunia. Hal ini akan menjadi hasil yang bermanfaat yang sesuai dengan

⁵ Dalam sebuah surat kepada Panel, Bupati mengungkapkan secara terperinci pandangan-pandangannya terhadap semua aspek Proyek dan dampaknya pada Teluk Bintuni.

rekomendasi Panel sebelumnya. Namun hal ini membutuhkan pendekatan yang kompleks. Panel sangat mendorong BP untuk memberi beasiswa bagi warga Papua di universitas-universitas terkemuka Papua dan lembaga-lembaga lain seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor, dalam bidang teknik seperti minyak dan gas, serta bidang-bidang lain seperti manajemen perikanan dan pembangunan pertanian pedesaan. Selain itu, BP seharusnya melakukan upaya yang lebih besar guna melatih warga Papua bekerja pada Proyek untuk posisi-posisi terampil dan penyelia, dan meningkatkan mereka pada posisi-posisi tersebut.

Isu-isu keamanan, meski merupakan keprihatinan, telah diperbaiki dengan dipakainya dan diterimanya Program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (“ICBS”) secara luas. Sebagaimana yang sebelumnya pernah dilaporkan Panel, ICBS telah memperoleh persetujuan dari polisi, TNI, dan para pejabat setempat dan daerah. Hal ini sedang disosialisasikan lebih luas di kalangan masyarakat setempat dan kepolisian setempat. Meskipun situasinya bisa menjadi kurang stabil apabila unit kepolisian atau TNI baru ditempatkan di wilayah Bintuni, ICBS Tangguh selama ini harus dianggap sebagai sebuah model untuk penggandaan di tempat lain di Indonesia.

Pekerjaan Proyek telah memberikan manfaat yang besar sekali bagi desa-desa setempat. Terdapat 7.000 orang yang dipekerjakan pada saat kunjungan Panel dengan puncak jumlah tenaga kerja sekarang diperkirakan lebih dari 9.000 pekerja pada musim kemarau 2007. Sejak 2004, Proyek telah merekrut 870 orang dari Desa-desa yang terkena Dampak langsung (“DAV”), dan menjelang akhir konstruksi, sekitar 940 penduduk desa setempat akan mempunyai pekerjaan dalam beberapa aspek Proyek.

Akibatnya, ketika hal itu terjadi, demobilisasi ketenagakerjaan Proyek akan menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagian besar orang yang sebelumnya dipekerjakan akan

tidak mempunyai pekerjaan selama fase operasi Proyek. Dan peluang yang ada sangat sedikit, kecuali kembali memancing udang. Maka, sangat penting bagi BP untuk menyosialisasikan akibat yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga tidak menimbulkan kejutan bagi masyarakat ini; dan juga penting bagi BP untuk mendukung sektor perikanan setempat dan sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan potensial yang lain, seperti pertanian dan konstruksi. Di samping itu, upaya-upaya untuk mengangkat para pekerja Papua dengan melatih mereka dengan keterampilan-keterampilan yang bisa dijual dan promosi ke posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar akan bermanfaat di masa depan setelah demobilisasi.

Selama ini, tidak ada masalah serius baik yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau keamanan. Menteri Lingkungan Hidup puas dengan kinerja BP, dan LSM-LSM lingkungan hidup senang dengan dukungan BP pada tujuan-tujuan lingkungan hidup yang lebih luas di Papua. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan lingkungan hidup, termasuk meminimalkan gangguan pada penangkapan ikan di wilayah-wilayah dekat dermaga (*pier*) dan anjungan, perlindungan mamalia laut di wilayah tersebut, dan injeksi ulang karbon dioksida ("CO₂"). Dan akan selalu ada risiko kecelakaan laut. Rekor keselamatan kerja Proyek sampai saat ini mengesankan, dan prosedur-prosedur standar dilaksanakan yang selalu menjadikan keselamatan kerja prioritas utama. Namun demikian, dengan adanya isu-isu keamanan/pemeliharaan yang dihadapi BP di Texas City dan di Teluk Prudhoe, adalah sangat penting bagi BP untuk terus mengawasi para kontraktornya dan memastikan dirinya sendiri dan publik secara teratur bahwa keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup harus tetap benar-benar efektif.

III. Rekomendasi Pokok

Meskipun tantangan-tantangan sesungguhnya masih ada, Tangguh mempunyai potensi untuk menjadi model pembangunan energi kelas dunia yang diakui, yang mempunyai dampak positif baik pada masyarakat pribumi maupun lingkungan hidup yang lebih luas. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut beberapa isu yang dihadapi Proyek, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali BP, harus diatasi dengan penuh ketegasan dan langsung. Dua tahun yang akan datang akan menjadi tahun-tahun yang sangat penting. Banyak dari isu ini telah diangkat ke permukaan oleh Panel dalam laporan-laporan sebelumnya. Mengangkat isu-isu itu lagi tidak untuk menyatakan bahwa BP tidak menanggapi atau belum berusaha menyelesaikannya. Sebagian dari isu tersebut bersifat fundamental dan mencerminkan lingkungan struktural eksternal, dan diperlukan perhatian dan upaya yang terus menerus, terutama pada tahun 2007 dan 2008 saat Proyek menjadi lebih nyata dan sikap-sikap terhadap Proyek menjadi jelas. Isu-isu tersebut meliputi:

- Memberi manfaat-manfaat nyata yang memadai kepada warga desa pantai utara untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan manfaat-manfaat yang diberikan kepada desa-desa yang dimukimkan kembali di pantai selatan;
- Membantu pemerintah setempat mengembangkan perikanan yang berkelanjutan di Teluk Bintuni atau peluang-peluang ekonomi yang lain bagi para penduduk desa yang cukup untuk mendukung sumber pendapatan di luar yang mempunyai potensi untuk mengganti pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan dalam konstruksi proyek.

- Melatih dan mendidik warga Papua dengan jumlah yang cukup dengan keterampilan-keterampilan dan bidang-bidang praktis sehingga sebagian dari mereka dapat berkembang menjadi penyelia, manajer, dan pemimpin di masa depan;
- Memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi baru di Manokwari, dan meningkatkan kapasitasnya, ke tingkat yang sebanding dengan yang telah dicapai di Jayapura.
- Membentuk sebuah sistem untuk melaksanakan kewaspadaan dan pemantauan yang terus menerus terhadap para kontraktor dan karyawan BP berkaitan dengan praktik-praktik yang aman dan terjamin dari segi lingkungan hidup.

Panel membuat rekomendasi-rekomendasi spesifik mengenai poin-poin ini dan yang lainnya, yang masing-masing diuraikan lebih lengkap di bawah ini.

Konstruksi dan Tenaga Kerja

- **Karena sebagian besar pekerja konstruksi lokal akan kehilangan pekerjaan, BP hendaknya: 1) menyosialisasikan proses demobilisasi sehingga penduduk desa tidak akan terkejut atau kecewa dengan demobilisasi tersebut; 2) membimbing dan memberi informasi semua pekerja DAV yang pekerjaan telah berakhir mengenai peluang kerja di bidang lain, seperti perikanan, pertanian atau bidang-bidang lain dengan memanfaatkan kecakapan yang diperoleh selama bekerja konstruksi; dan 3) bekerja bersama Departemen Perikanan, bersama Bupati, untuk mendapatkan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan peluang usaha perikanan yang berkelanjutan.**
- **BP hendaknya mengawasi penggunaan prosedur keluhan karyawan yang dikembangkan oleh kontraktor Rancang-bangun, Pengadaan dan Konstruksi (“EPC”) untuk menjamin bahwa prosedur ini diterapkan dengan adil dan para pekerja senantiasa diingatkan akan keberadaan prosedur tersebut.**
- **Tujuan hendaknya ditetapkan oleh BP untuk menjamin bahwa warga Papua menempati posisi karyawan semi-terampil dan terampil pada saat dimulainya operasi, dan pada interval 5, 10, 15 dan 20 tahun setelah itu. BP hendaknya melakukan audit tahunan untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran ini tercapai.**

- BP seharusnya secara terus menerus menekankan prioritas-prioritas kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup kepada semua kontraktor, sub-kontraktor, dan karyawan.

Keamanan dan Hak Asasi Manusia

- BP harus terus menyosialisasikan Petunjuk Keamanan Lapangan (JUKLAP) untuk memperjelas peran dari pasukan keamanan swasta dan kepolisian, dan harus terus memberi latihan HAM secara reguler kepada semua personil yang terlibat dalam keamanan Proyek.
- TNI harus terus diberitahu mengenai semua latihan keamanan untuk Tangguh dan, dengan persetujuan kepolisian, harus diundang untuk mengawasi sosialisasi atau pelatihan apa pun.
- Semua dana yang disediakan BP untuk kepolisian harus diberitahukan kepada publik dan diberitakan di website BP, baik pembayaran itu dilakukan langsung ke pasukan keamanan atau tidak langsung dengan melalui BPMIGAS, seperti yang secara khusus disyaratkan oleh Petunjuk Keamanan Lapangan.
- Jika pasukan keamanan tambahan dikerahkan ke Bintuni, BP harus berupaya memastikan bahwa pasukan tersebut menerima latihan HAM yang sama dengan yang saat ini diberikan kepada pasukan keamanan yang bekerja langsung untuk Proyek.

Manfaat-manfaat untuk Teluk Bintuni dan Daerah-daerah di Kawasan Kepala Burung

- Perasaan perlakuan yang tidak adil desa-desa pantai utara belum berhasil ditanggapi secara memadai. BP seharusnya mempercepat manfaat-manfaat ke pantai utara dengan:
 - mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni secara tepat waktu.;
 - berusaha memperoleh persetujuan yang diperlukan di Jakarta bagi penggunaan kayu gelondongan yang tergeletak tak terpakai dan memburuk di lokasi LNG;
 - terus bekerja dengan para pemimpin desa-desa untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Masyarakat (“CAP”) secara penuh dan efektif;
 - bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk pengadaan listrik ke DAV non-pemukiman kembali
 - melaksanakan program air bersih untuk desa-desa di pantai utara;

- memperbarui upaya-upayanya untuk mendirikan program usaha mikro dan keuangan mikro di wilayah Teluk Bintuni.
- BP seharusnya terus bekerja dengan Bupati Bintuni untuk mendukung upaya-upaya pendidikan di Desa-desa Yang Terkena Dampak Langsung (“DAV”) dan seharusnya mengembangkan pekerjaan Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (“TCHU”) guna membantu mengendalikan malaria, diare, dan HIV/AIDS di seluruh wilayah Teluk Bintuni.
- BP seharusnya berinvestasi dalam pendidikan tinggi di kawasan Kepala Burung dengan membuat beasiswa “Tangguh” bagi para siswa Papua yang pantas mendapatkannya di Universitas Cendrawasih, Universitas Papua (“UNIPA”) atau lembaga-lembaga lain dan seharusnya juga menganugerahi jabatan maha guru atau guru besar di sekolah-sekolah tersebut untuk pelatihan para pemimpin masa depan Papua.
- BP seharusnya memfasilitasi pembangunan usaha dan pemberdayaan di kawasan Kepala Burung dengan mendorong para kontraktornya untuk meningkatkan pembelian dari usaha setempat dan terus mendukung pelatihan dunia usaha di kawasan Kepala Burung.

Koordinasi dengan Pemerintah Setempat dan Pemerintah Daerah

- Sejak Gubernur IJB terpilih dan ibukota di Manokwari didirikan, BP seharusnya meningkatkan kehadiran komunikasinya di Manokwari, dan mempunyai kapasitas penuh untuk berhubungan dengan Gubernur, para pejabat kabinetnya dan para pemimpin dewan legislatif provinsi sehingga para pejabat pemerintah daerah senantiasa mengetahui program-program ekonomi dan sosial Tangguh dan dimintai nasihat bilamana perlu
- BP seharusnya terus berkoordinasi secara erat dengan Bupati guna mendukung pembangunan kapasitas pemerintahan di Bintuni untuk membantu fungsi pemerintahan setempat secara efektif dan transparan, dan memperbaiki pemberian layanan-layanan publiknya, seperti kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.
- BP seharusnya juga terus mendukung pengembangan kapasitas dan transparansi di tingkat daerah dengan bekerja sama dengan USAID dan UNDP. Sejak UNDP memindahkan kantornya ke Manokwari, BP dan UNDP seharusnya mengubah Nota Kesepahaman (“NOTA KESEPAHAMAN”) dengan Papua untuk memasukkan IJB.

Transparansi Arus Pendapatan ke Daerah

- BP seharusnya melanjutkan dukungannya pada transparansi fiskal dan pemakaian Inisiatif Transparansi Industri (“EITI”) di kalangan pejabat pemerintah pusat

senior dan seharusnya secara khusus mendorong BPMIGAS, Menteri Energi dan Menteri Keuangan serta para pejabat lain untuk mengumumkan semua informasi pemerolehan dan alokasi pendapatan yang tidak rahasia dari Tangguh.

- BP seharusnya mendorong Bank Dunia, yang melaksanakan penelitian rintisan mengenai arus pendapatan pada tahun 2005, untuk mengumpulkan data tahunan yang ada dan menerbitkan sebuah analisa sehingga para pembuat kebijakan di Papua akan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai sumber-sumber dan penggunaan transfer pendapatan dan fiskal.
- BP seharusnya memastikan bahwa transparansi adalah salah satu elemen kunci dalam dukungannya pada program-program yang ada sekarang ini dan di masa mendatang dengan USAID, UNDP, Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (CLGI/YIPD) dan Bank Dunia yang dirancang untuk memperbaiki pemerintahan sipil, manajemen fiskal dan penganggaran di Papua.
- BP seharusnya berusaha agar senantiasa mengetahui bagaimana transfer pendapatan menurut kebijakan Otonomi Khusus berkembang, terutama yang berkaitan dengan transfer pendapatan gas alam.

Lingkungan Hidup

- Personil lingkungan hidup senior BP dan juga personil lingkungan hidup senior para kontraktornya seharusnya memantau secara teratur sistem pelacakan pelaksanaan AMDAL untuk memastikan bahwa sistem tersebut mencakup semua wilayah signifikan dan meninjau hasil-hasilnya pada basis kekinian sehingga kesenjangan yang ada dapat diketahui dan dikoreksi dengan segera. Cacat apapun seharusnya segera ditunjukkan kepada kontraktor EPC (“KJP”) dan sub-kontraktor mana saja yang bertanggung jawab, yang seharusnya menyusun sebuah rencana dengan BP untuk segera melakukan koreksi.
- BP seharusnya mendorong GOI untuk mengumumkan semua laporan Departemen Lingkungan Hidup (“MOE”) dan tanggapan tertulis BP kepada MOE; dan BP hendaknya mengumumkan semua audit dan laporan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti audit dan laporan ke Bank Pembangunan Asia. Di samping itu, BP hendaknya mengumumkan segala tindakan yang diambil untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan lingkungan hidup.
- BP harus mengenakan kontrol yang ketat untuk mencegah pelepasan yang signifikan yang berhubungan dengan Proyek, termasuk upaya yang sebaik mungkin untuk mencegah dan mengelola segala tumpahan dari kapal yang bisa merusak perikanan di wilayah Proyek. Dengan demikian, BP seharusnya melaksanakan semua standar perjanjian internasional pada semua kapal yang berlabuh di lokasi.

- Dalam konsultasinya dengan tim pakar Mamalia Lautnya, BP seharusnya melembagakan sebuah rencana pemantauan dan manajemen jangka panjang yang mengurangi dampak kurang menguntungkan pada lumba-lumba Sousa dan mamalia laut lainnya serta reptil. Sebagai bagian dari upaya ini, BP seharusnya segera mulai mendidik kapten kapal tentang perlunya mengambil tindakan guna menghindari kontak langsung dengan kehidupan laut.
- BP hendaknya terus mendesak GOI untuk memberikan izin penangkapan dan injeksi ulang CO₂ sedini mungkin sebagai strategi jangka panjang untuk pengelolaan emisi CO₂ dari Tangguh.
- Dengan para mitra lingkungan hidupnya, BP hendaknya melanjutkan Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati yang berhasil yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, penilaian kesehatan perikanan, survei flora dan fauna dan perlindungan pohon bakau.

Informasi Publik

- Sejak Manokwari menjadi ibukota daerah provinsi IJB, BP seharusnya meningkatkan penyebaran informasi di Manokwari melalui radio, artikel surat kabar dan iklan atau media yang lainnya.
- BP seharusnya terus mengembangkan komunikasi di Teluk Bintuni, dengan radio pantai utara dan selatan, yang bisa memfokuskan pada diskusi mengenai aktivitas-aktivitas Tangguh dengan acara interaktif; surat kabar bulanan, yang seharusnya disebarkan di seluruh lokasi LNG dan base camp Babo; dan brosur bergambar atau video, yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan isu-isu penting ke audiensi setempat yang luas.
- BP seharusnya menginformasikan dengan lebih baik media nasional di Jakarta tentang Tangguh untuk mendorong pemahaman mengenai manfaat-manfaat ekonomi dan sosial Proyek di kalangan para pemimpin opini Indonesia.

IV. Perkembangan Politik

Untuk pertama kalinya pada tahun 2006, warga Papua memilih gubernurnya melalui pemilihan umum langsung. Setelah pembahasan yang panjang dan melelahkan antara pejabat pemerintah Papua dan Pusat mengenai diadakan tidaknya Pemilu tersendiri untuk provinsi IJB, akhirnya Pemilu diselenggarakan di Provinsi Papua dan juga IJB pada bulan Maret. Jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya cukup besar, dan proses Pemilu sendiri berlangsung

damai. Bram Atururi, pejabat Gubernur sejak provinsi IJB dibentuk pada tahun 2003, menang dengan total suara 61%. Hasil yang ketat terjadi di provinsi Papua. Barnabas Suebu, yang menjadi gubernur di era 1980-an sebelum dikirim menjadi Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, menang dengan 31% dukungan.

Sebelumnya Panel telah bertemu dengan kedua gubernur, dan menemuinya lagi pada kunjungan kali ini. Meski terdapat ketegangan sebagai akibat dari pemekaran Papua menjadi dua provinsi, kedua gubernur tampak antusias untuk melangkah menuju kemitraan. Gubernur Suebu menyatakan niatnya untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Gubernur Arturi dan para pimpinan setempat pada awal 2007 untuk menyelesaikan masalah alokasi dana. Pertemuan antara keduanya akhirnya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2007 dan berhasil merumuskan kesepakatan tentang pengakuan atas provinsi baru, pengelolaan bersama atas ekonomi dan infrastruktur, dan pengelolaan pendapatan Otonomi Khusus secara bersama-sama. Pertemuan yang lebih luas, dengan melibatkan anggota DPRD kedua provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan Maret. Jika melalui proses ini kedua provinsi dapat mencapai kesepakatan mengenai sejumlah masalah fiskal penting, maka penundaan dan ketidakpastian berlarut-larut seputar implementasi Otonomi Khusus akan bisa diselesaikan.

Panel juga bertemu dengan Ketua dan delegasi MRP, yang telah bekerja selama setahun, tapi sama sekali tidak diindahkan oleh Pemerintah Indonesia dalam keputusannya untuk menyelenggarakan Pemilu di IJB. Saat bertemu dengan Panel, MRP bersikukuh pada pendirian bahwa provinsi IJB tidak konstitusional dan oleh karena itu tidak ikut punya hak atas dana Otonomi Khusus. Ketidaksepehaman ini tentu saja menciptakan ketegangan dengan para pemimpin provinsi IJB. Akibatnya, sebagian kalangan mengusulkan agar MRP dipecah menjadi

dua, atau satu untuk masing-masing provinsi di Papua. Tidak ada putusan akhir yang jelas mengenai sengketa ini, tetapi untuk jangka pendek, hal ini telah mengganggu implementasi Otonomi Khusus di Provinsi IJB, terutama karena pengaruhnya terhadap alokasi dana Otonomi Khusus.

Presiden Yudhoyono (SBY), yang menyatakan niatnya untuk berfokus pada Papua setelah penyelesaian konflik Aceh, memulai upaya ini pada tahun 2006 tapi masih belum berhasil mencapai penyelesaian. SBY mengunjungi Papua pada bulan Juli lalu dan segera setelahnya mengumumkan bahwa akan ada “Kesepakatan Khusus untuk Papua” guna mempercepat implementasi Otonomi Khusus, memfokuskan upaya pembangunan ekonomi dan sosial, dan menyediakan “tindakan afirmatif” bagi warga Papua di bidang bisnis, layanan pendidikan dan keamanan. Meskipun rancangan Instruksi Presiden sudah dibuat, tetapi hingga saat ini Inpres tersebut belum berhasil diselesaikan. Kemungkinan penyebabnya adalah belum tercapainya konsensus antara kedua gubernur dan MRP.

Salah satu elemen dalam rancangan Kesepakatan Baru tersebut, yang berupa pembentukan “Tim Koordinasi”⁶ untuk Papua oleh pemerintah pusat, sudah mulai bekerja. Panel bertemu dengan sejumlah Menteri penting dalam tim ini, yang terlibat jauh dalam penciptaan proses untuk mencapai konsensus dengan pemerintah daerah. Belum diketahui apakah Pemerintah Indonesia akan memaksakan solusi kepada para pemimpin Papua jika mereka gagal mencapai kesepakatan, tetapi tampaknya Pemerintah Indonesia lebih suka jika para pejabat Papua sendiri yang memecahkan kebuntuan tersebut. Tertundanya pencapaian konsensus antara kedua gubernur dan MRP telah meningkatkan ketegangan politik, memperpanjang

⁶ Tim Koordinasi untuk Papua ini melibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

ketidakpastian alokasi pendapatan, dan memunculkan gangguan besar terhadap tata pemerintahan yang efektif.⁷

Akan tetapi, meski tanpa diterbitkannya kebijakan Papua yang baru, dana dari pemerintah pusat mengalir ke Papua dengan besaran yang belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Ini utamanya akibat dari alokasi formula yang terkait langsung dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat. Total dana dari GOI untuk provinsi Papua dan subdivisi bawahnya lebih dari 16 trilyun rupiah, atau sekitar \$1,7 milyar di tahun 2006, lebih dari empat kali dana yang diterima lima tahun yang lalu.⁸ Sesuai dengan undang-undang, beberapa dana langsung mengalir ke kabupaten dan kota, yang kebanyakan dari kabupaten atau kota ini tidak mempunyai sistem pengendalian keuangan publik dan pemerintahan yang efektif. (Lihat bagian IX mengenai Transparansi Pendapatan).

Dalam upaya memetik hasil yang lebih cepat dan nyata dari dana yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi, Gubernur Suebu mengumumkan kebijakan untuk mengalokasikan 100 juta rupiah (sekitar \$11.000 untuk setiap) desa di Papua. Mengalirkan dana besar secara langsung ke desa-desa dilakukan untuk menghindari birokrasi provinsi dan kabupaten. Salah satu model untuk program ini adalah BP Rencana Tindakan Masyarakat untuk DAV. Ada lebih dari 2700 desa di kawasan Papua. Gubernur Suebu mengandalkan bantuan Bank Dunia dan lembaga lokal yang ada untuk mengimplementasikan program ini pada tahun 2007. Karena Gubernur dari dua provinsi ini belum mencapai kesepakatan, maka tidak jelas apakah program ini akan diterapkan untuk provinsi Papua saja atau termasuk IJB juga.

⁷ Ada laporan mengenai tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua untuk mengalokasikan pendapatan Otonomi Khusus, tetapi untuk saat ini, tidak jelas apakah laporan ini mencerminkan kesepakatan atau upaya unilateral untuk mengatur pendapatan tersebut.

V. Konstruksi dan Tenaga Kerja

Lokasi LNG sekarang memiliki area konstruksi darat berukuran besar dengan sebuah armada kecil, dua dermaga panjang dan bagian-bagian dari dua anjungan yang berada di lepas pantai. Struktur-struktur besar sedang dirakit, termasuk dua tangki penyimpanan LNG dan fasilitas pencairan terkait. Meski area seluas sekitar 335 hektar ini telah disiapkan dan dibersihkan, lokasi Proyek seluas sekitar 3200 hektar ini memiliki area penyangga yang sangat luas dikelilingi pagar yang tidak akan disentuh.

Saat ini ada lebih dari 7000 pekerja di lokasi ini. Hampir semua pekerja tinggal di perumahan modular, yang dilengkapi ruang rekreasi, lapangan tenis, lapangan sepak bola, kantin dan fasilitas-fasilitas lain. Galangan kombo sepanjang 1,3 km memiliki fasilitas lengkap, dengan kerekan-kerekan besar di setiap ujung terminalnya, dan memungkinkan kapal-kapal besar untuk bersandar dan peralatan-peralatan berat dikirimkan, sebagaimana yang Panel saksikan. Komponen pertama dari enam anjungan pengeboran telah tiba dan sedang disiapkan untuk dipasang pada lokasi permanennya di Teluk Bintuni. Pengeboran sumur dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2007.

Belum pernah terjadi kematian atau cedera serius di lokasi ini. Memang ada sejumlah cedera, terutama pada tangan dan jari-jari, tetapi sepengetahuan Panel, Proyek telah berhasil mencapai lebih dari 20 juta jam kerja orang tanpa gangguan kerja berarti. Untuk terus menjaga rekor ini, BP telah membentuk Komite Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kontraktor terhadap kesehatan dan keselamatan. Tentu saja, BP perlu untuk terus menekankan prioritas ini kepada semua kontraktor, subkontraktor, dan pegawai.

⁸ Lihat Laporan Bank Dunia, "Papua Public Expenditure Analysis: Regional Financial and Service Delivery in Indonesia's Most Remote Region," di halaman 31, dapat diperoleh dari www.worldbank.org/id.

Kode Etik tenaga kerja dan prosedur penyampaian keluhan pegawai yang diusulkan oleh Panel sedang diimplementasikan. Elemen-elemen Kode Etik ini menjadi bagian integral dalam latihan induksi pekerja dan disampaikan kepada semua pegawai dalam kontrak kerjanya, dimuat dalam kebijakan tempat kerjanya dan dipasang di tempat-tempat di sekitar lokasi. Tetapi belum ada dokumen yang mencakup “Kode Etik Tenaga Kerja.” Berbagai komponen tersebut harus dikumpulkan ke dalam satu dokumen, seperti direkomendasikan oleh Audit Internal Manajemen Tenaga Kerja BP.

Prosedur penyampaian keluhan, yang diterapkan oleh KJP pada bulan Juli 2006, memungkinkan setiap pegawai di tempat kerja untuk menyerahkan kartu keluhan untuk setiap keluhan terkait pekerjaan. Keluhan akan diselidiki oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan pekerja dan diikuti oleh BP. Jika komite tidak bisa menyelesaikan keluhan tersebut, tersedia mediasi eksternal dan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum.⁹ Selama enam bulan pertama implementasi, prosedur ini berbuah 430 tindakan, sebagian besar di antaranya terkait dengan masalah gaji. Hanya 16 dari semua keluhan ini yang belum terselesaikan.¹⁰ Sejauh yang diketahui oleh Panel, tidak ada keluhan mengenai pelanggaran HAM atau hak-hak sipil apa pun. Proses yang diimplementasikan selaras dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Panel. Yang penting sekarang adalah bahwa prosedur ini harus diterapkan secara adil oleh komite keluhan dan pekerja selalu mengetahui keberadaannya.

Persyaratan AMDAL dalam perekrutan warga Papua dan pekerja dari DAV telah dipenuhi. Audit Internal Manajemen Tenaga Kerja BP, yang direkomendasikan oleh Panel, menyimpulkan bahwa BP telah secara signifikan melampaui semua target minimumnya dalam hal perekrutan pekerja dari DAV untuk semua kategori jenjang kecakapan. Saat Panel

⁹ Rangkuman lengkap tentang tata cara dalam Prosedur Penyampaian Keluhan Kerja disertakan sebagai Lampiran 2.

melakukan kunjungan, ada sekitar 2900 pekerja asal Papua dari total 7000 tenaga kerja konstruksi, atau lebih dari 40%. Dari jumlah ini, 617, atau hampir 10%, berasal dari DAV.¹¹ Secara khusus, BP menempatkan 55 warga Papua untuk posisi komunikasi, pengembangan masyarakat dan administrasi. Posisi-posisi ini semuanya adalah pekerjaan dengan kategori kecakapan *skilled* atau *semi-skilled*. Selain itu, BP terus menjalankan program pelatihannya untuk warga Papua di area operasi teknis LNG di Bontang. Tahun ini, 24 peserta baru dikirimkan untuk pelatihan ini, sehingga jumlah warga Papua yang akan mampu bekerja dalam kategori terampil (*skilled*) selama tahap operasi akan menjadi 53 orang.

Tetapi hampir semua pekerja di aktivitas-aktivitas yang terkait konstruksi masuk dalam kategori tidak terampil (*unskilled*). Jumlah pekerja untuk posisi terlatih dan semi-terampil masing-masing hanya 52 dan 113. Dengan sedikitnya warga Papua yang dilatih dan dipromosikan ke posisi kerja yang lebih tinggi, angka-angka ini menjadi tidak memadai. Kontraktor harus berupaya lebih keras lagi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi warga Papua.

Menurut target AMDAL, pada tahun permulaan hanya 8% dari 183 posisi terlatih akan diisi oleh warga Papua, dan meningkat menjadi 13% dua tahun kemudian. Sementara pada posisi semi-terampil, 53 (29%) dari 184 posisi yang ada akan diisi warga Papua, dan hanya 3 akan diisi warga DAV. Setelah sepuluh tahun operasi, AMDAL menargetkan 40% posisi semi-terampil dan 2 (1%) posisi terlatih diisi oleh warga DAV; sedangkan warga Papua akan mengisi sekitar 50% posisi semi-terampil sisanya dan 40% posisi terampil. Target-target tenaga kerja ini sangat penting untuk dicapai, bahkan jika mungkin dilampaui. Secara khusus, terkait dengan jumlah total warga Papua, Panel mendesak BP untuk melampaui komitmen AMDAL dan

¹⁰ Prosedur penyampaian keluhan terus berjalan di tahun 2007 ini dengan 53 kasus, 41 di antaranya sudah diselesaikan.

mencanangkan tujuan-tujuan indikatif untuk warga Papua pada posisi terlatih dan manajerial pada tahap awal proyek, dan pada interval-interval lima tahun setelahnya; dan juga mengaudit target ketenagakerjaan ini setiap tahun untuk memastikan ketercapaiannya.

Diperkirakan, masalah “ketenagakerjaan” baru yang paling serius yang menggelayuti Proyek ini adalah demobilisasi. Banyak pekerjaan konstruksi jangka pendek yang ditangani pekerja temporal dari DAV sudah selesai. Jumlah tenaga kerja semacam ini akan bertambah secara substansial selama 2007 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2008. Lampiran 3 adalah bagan ketenagakerjaan Proyek selama seluruh tahap konstruksi. Bagan ini membandingkan demobilisasi secara umum dengan demobilisasi pekerja Papua dan DAV. Tampak jelas bahwa pada tahun 2007 dan 2008, tak kurang dari 600 pekerja DAV akan kembali ke desa asalnya setelah pekerjaan-pekerjaan temporal itu berakhir.¹² Para pekerja yang kebanyakan masih muda ini bisa merasakan manfaat dari kecakapan dan disiplin kerja yang dipelajari selama di Tangguh, tetapi mereka tidak akan memiliki penghasilan atau aktivitas eksternal alternatif. Jelas hal ini dapat menjadi sumber ketegangan dan instabilitas di dalam DAV dan harus ditangani.

BAP harus menyosialisasikan proses demobilisasi secara efektif. Tim ISP harus mengadakan rapat desa untuk menjelaskan demobilisasi yang akan terjadi, dan mencoba memahami penduduk bahwa tidak ada pekerjaan pengganti baru di Proyek yang tersedia. Mungkin sebagian warga tidak bisa menerima hal ini, tapi rapat semacam ini harus diulang-ulang. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah keterkejutan dan kekecewaan warga.

Pekerja yang kontraknya telah berakhir perlu diberi perhatian khusus dan panduan untuk membantu mereka melakukan penyesuaian. Sama seperti dulu saat menjamin pekerjaan untuk

¹¹ Bagan komposisi tenaga kerja di Proyek bisa dilihat pada Lampiran 3.

setiap keluarga DAV, sekarang BP harus membantu para pekerja DAV ini kembali melaut atau memanfaatkan kecakapan yang diperoleh selama bekerja di konstruksi untuk pekerjaan lainnya. Jika diminta, pekerja dari DAV yang kontraknya sudah berakhir harus diikutkan dalam program pelatihan kejuruan di pusat pelatihan baru di Aranday untuk meningkatkan kecakapan mereka yang dapat dijual. Selain itu BP harus memantau upaya ini dan mengukur hasilnya untuk menentukan apakah bantuan tersebut efektif.

Karena sumber penghasilan eksternal yang paling dekat dan menjanjikan adalah dari perikanan, dan berikutnya dari pertanian, BP harus membantu mengembangkan sumber daya alam komunitas ini. Upaya tersebut sudah dilakukan dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB), yang akan memfokuskan upaya awalnya pada perikanan yang berkelanjutan, dan mengembangkan program untuk meningkatkan pertanian setempat pada tahun 2007. Langkah ini bisa menjadi bagian penting dalam mengganti dan memperluas penghasilan eksternal bagi warga DAV dan komunitas lainnya di Teluk Bintuni.

BP juga harus bekerja bersama Kementerian Perikanan, bersama-sama Bupati, untuk mendapatkan peralatan dan pelatihan guna meningkatkan peluang bisnis perikanan yang berkelanjutan. Panel sempat bertemu dengan Menteri Perikanan, seorang putra Papua yang memiliki fokus untuk meningkatkan peluang ini untuk warga Teluk Bintuni. BP harus segera menangkap peluang ini, senyampang masih ada. Menteri menyampaikan kepada Panel tentang dukungan khusus yang disediakan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perikanan artisanal,¹³ termasuk jaring untuk meningkatkan hasil tangkapan, fasilitas penyimpanan dan pengesan, kapal-kapal kecil (5-10 ton kotor) dan saran ahli untuk mengembangkan pasar baru.

¹² Pekerja dari DAV tetap memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam tahap operasi, termasuk di bidang keamanan, tim ISP dan perawatan.

¹³ Perikanan artisanal adalah teknologi pemanenan, pemrosesan dan pendistribusian berskala kecil yang perlu banyak tenaga untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan.

Menteri juga mengindikasikan bahwa Teluk Bintuni mungkin ditutup untuk kapal-kapal pemukat luar oleh Bupati untuk mengatasi kekhawatiran akan terlalu banyaknya ikan yang ditangkap dan menyusutnya sumber daya ini. Panel mendapat informasi bahwa Bupati telah memberi lisensi untuk beberapa operasi pemukatan baru di Teluk Bintuni. Jadi, pembatasan operasi tambahan, mungkin dengan peraturan yang lebih efektif, harus segera dijabari bersama Bupati, sebelum aktivitas pemukatan berskala besar di Teluk Bintuni diteruskan oleh Jayanti¹⁴ atau operator luar negeri.

Rekomendasi

- **Karena sebagian besar pekerja konstruksi lokal akan kehilangan pekerjaan, BP hendaknya: 1) menyosialisasikan proses demobilisasi sehingga penduduk desa tidak akan terkejut atau kecewa dengan demobilisasi tersebut; 2) membimbing dan memberi informasi semua pekerja DAV yang pekerjaan telah berakhir mengenai peluang kerja di bidang lain, seperti perikanan, pertanian atau bidang-bidang lain dengan memanfaatkan kecakapan yang diperoleh selama bekerja konstruksi; dan 3) bekerja bersama Departemen Perikanan, bersama Bupati, untuk mendapatkan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan peluang usaha perikanan yang berkelanjutan.**
- **BP harus mengawasi pelaksanaan prosedur penyampaian keluhan yang dikembangkan oleh kontraktor EPC untuk memastikan bahwa prosedur tersebut diterapkan secara adil dan semua pekerja secara teratur diberitahu mengenai keberadaan prosedur itu.**
- **Tujuan hendaknya ditetapkan oleh BP untuk menjamin bahwa warga Papua menempati posisi karyawan semi-terampil dan terampil pada saat dimulainya operasi, dan pada interval 5, 10, 15 dan 20 tahun setelah itu. BP hendaknya melakukan audit tahunan untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran ini tercapai.**
- **BP seharusnya secara terus menerus menekankan prioritas-prioritas kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup kepada semua kontraktor, sub-kontraktor, dan karyawan.**

¹⁴ Jayanti adalah operator pukat Indonesia yang beroperasi besar-besaran di Teluk Bintuni, yang dihentikan sekitar dua tahun lalu. Sebagian besar armadanya masih bersandar di dekat Babo.

VI. Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Isu keamanan dan HAM tetap menjadi perhatian bagi banyak pemangku kepentingan, terlebih dalam komunitas LSM. Panel juga memiliki perhatian serupa. Hingga saat ini, keamanan Tangguh berjalan tanpa insiden berarti. Semua insiden keamanan sejauh ini sudah ditangani oleh kontraktor keamanan swasta Tangguh (terdiri dari warga Papua) dan polisi setempat. Kebanyakan insiden melibatkan perilaku dalam keadaan mabuk atau demonstrasi terkait perekrutan tenaga kerja. Tidak ada insiden yang mengarah pada tuduhan penggunaan kekerasan secara tidak semestinya atau pelanggaran HAM lainnya.

Berdasarkan konsultasi Panel dengan petugas kepolisian dan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan keamanan, jelaslah bahwa keamanan berbasis masyarakat terpadu Tangguh diterima oleh pasukan keamanan masyarakat dan berfungsi dengan baik. Kepolisian Papua ikut andil dalam menyosialisasikan Petunjuk Keamanan Lapangan (JUKLAP), yang ditandatangani tahun 2004, yang menguraikan peran dari pasukan keamanan swasta dan kepolisian.¹⁵ Lokakarya sosialisasi di Kepala Burung dan di Jayapura dihadiri oleh polisi, TNI, pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat. Panel menyambut baik aktivitas ini, dan mendorong BP untuk melanjutkannya secara reguler. Personil baru di setiap pasukan keamanan harus dilatih mengenai prosedur ini, dan dipertemukan dengan lebih banyak personil berpengalaman. Selain itu, BP terus menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia – dilaksanakan oleh ELSHAM – bagi semua personil yang terlibat dalam keamanan Proyek. Langkah ini juga harus dilanjutkan secara reguler sepanjang masa operasi Proyek.

Keamanan Tangguh dan kepolisian juga akan mengikuti latihan gabungan untuk mempraktikkan prosedur eskalasi yang ditetapkan dalam Petunjuk Keamanan Lapangan. Latihan ini penting. Tetapi akan lebih baik jika TNI dilibatkan sebagai pengamat dalam latihan

ini, meskipun tidak terlibat langsung dalam prosedur JUKLAP. Mengingat peran pentingnya dalam keberhasilan operasi ICBS, TNI harus selalu diberitahu mengenai semua pelatihan keamanan untuk Tangguh dan, dengan persetujuan kepolisian, diundang untuk mengamati setiap sosialisasi atau latihan.

BP dapat menyediakan dana untuk aktivitas pelatihan dan sosialisasi ini. Semua pengeluaran harus diberitahukan kepada publik, dan diterbitkan di website BP. Hal ini harus dilakukan terlepas dari apakah pembayaran diberikan langsung kepada pasukan keamanan, atau secara tidak langsung melalui BPMIGAS, sebagaimana secara khusus ditentukan dalam JUKLAP.

Terdapat kekhawatiran yang cukup besar di kalangan LSM bahwa pasukan tambahan dalam jumlah cukup besar akan segera dikerahkan ke Papua. Sejauh ini, belum ada pengerahan pasukan keamanan baru ke wilayah Teluk Bintuni. Tetapi dalam perkiraan Panel, itu akan dilakukan. Kepala Kepolisian sekali lagi memberitahu Panel bahwa kapabilitas polisi tambahan diperlukan di Bintuni karena cakupan areanya yang luas dan kebutuhan akan tanggap perairan yang lebih cepat. Jadi, penambahan kapabilitas polisi di Bintuni tidaklah mengherankan dan tidak perlu dianggap sebagai masalah.

BP perlu mendesak agar pasukan keamanan baru apa pun yang didatangkan menerima pelatihan hak asasi manusia yang sama dengan yang saat ini diberikan kepada pasukan keamanan yang bekerja langsung untuk Proyek.

Di kalangan media beredar spekulasi bahwa Kostrad, Komando Strategis TNI, atau AL, mungkin merelokasi pasukannya ke Kepala Burung. Keputusan strategis ini tampaknya tidak akan berdampak langsung terhadap Tangguh, dan tidak akan mempengaruhi keamanan Tangguh kecuali jika terjadi perubahan besar dalam kepolisian mengenai Papua.

¹⁵ Lihat Laporan Ketiga Panel yang diserahkan pada Februari 2005, di halaman 14, 23-26.

Rekomendasi

- **BP harus terus menyosialisasikan Petunjuk Keamanan Lapangan (JUKLAP) untuk memperjelas peran dari pasukan keamanan swasta dan kepolisian, dan harus terus memberi latihan HAM secara reguler kepada semua personil yang terlibat dalam keamanan Proyek.**
- **TNI harus terus diberitahu mengenai semua latihan keamanan untuk Tangguh dan, dengan persetujuan kepolisian, harus diundang untuk mengawasi sosialisasi atau pelatihan apa pun.**
- **Semua dana yang disediakan BP untuk kepolisian harus diberitahukan kepada publik dan diberitakan di website BP, baik pembayaran itu dilakukan langsung ke pasukan keamanan atau tidak langsung dengan melalui BPMIGAS, seperti yang secara khusus disyaratkan oleh Petunjuk Keamanan Lapangan.**
- **Jika pasukan keamanan tambahan dikerahkan ke Bintuni, BP harus berupaya memastikan bahwa pasukan tersebut menerima latihan HAM yang sama dengan yang saat ini diberikan kepada pasukan keamanan yang bekerja langsung untuk Proyek.**

VII. Manfaat bagi Teluk Bintuni dan Daerah Kepala Burung

A. Teluk Bintuni

Panel di dalam laporan terdahulu telah menekankan pentingnya memberi manfaat atau kemaslahatan bagi wilayah itu dalam waktu dekat. Panel memuji BP dan tim ISP-nya atas upaya yang sangat bagus untuk membantu masyarakat Teluk Bintuni, yang paling terpengaruh oleh Proyek, untuk menentukan cara meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. CAP dan program-program terkait telah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dalam hal kekayaan materi, pendidikan, air bersih dan peningkatan lokal lainnya yang dipilih oleh warga desa pantai utara dan selatan.

Pemukiman kembali DAV, khususnya, telah menghasilkan peningkatan material dalam hal kualitas hidup. Selain rekonstruksi desa Tanah Merah dan Sangga secara keseluruhan, Seperti yang diuraikan di dalam laporan Panel terdahulu, warga desa Onar Lama sekarang hidup

dalam rumah-rumah baru yang bagus dan lengkap dengan listrik, fasilitas masak dan kamar mandi. Setiap rumah mempunyai penampung air hujan dan septic tank, yang dibuatkan langsung di sana. Banyak di antara mereka mempunyai kebun untuk bertanam sayur. Rumah dan sistem terkait dibangun oleh penduduk dengan dukungan dari tukang kayu profesional. Rumah-rumah ini berfungsi sebagai model ekonomis yang dapat ditiru untuk perumahan di daerah sekitar situ. Namun, masalah ketergantungan tetap berlanjut, terutama terkait dengan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga disel dan kebutuhan lain. BP hendaknya membantu masyarakat ini dalam bertransisi menuju kemandirian, dan tentunya untuk memenuhi semua komitmen di dalam LARAP, tetapi harus menjelaskan bahwa BP tidak dapat terus-menerus menyediakan bahan bakar dan dukungan lain.

BP telah memberi banyak kemudahan kepada semua DAV di bidang kesehatan dan pendidikan. Sejak dimulai pada tahun 2002, Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (TCHU) mencapai hasil yang sangat positif di bidang kesehatan publik di seluruh wilayah Teluk. TCHU telah menapai kemajuan luar biasa di dalam (1) mengendalikan malaria yang sekarang prevalensinya 5% (bandingkan dengan 23% di tahun 2000)¹⁶; (ii) menjaga agar tingkat fatalitas diare tetap rendah; dan (iii) kekurangan gizi. TCHU telah mendapatkan pengakuan internasional atas karyanya, menerima Helios Award¹⁷ dari BP atas program pemasaran-sosial tentang malaria dan diare dan memenangkan UNAIDS/National AIDS *Prevention Committee Gold Award* untuk program HIV di tempat kerja terbaik di Indonesia. Karena tersebar luasnya HIV/AIDS di Papua, upaya pencegahan di Teluk Bintuni, yang kemudian ditindaklanjuti lebih jauh di wilayah itu

¹⁶ Lihat Lampiran 5 untuk informasi lebih lanjut tentang hasil sukses program pemasaran-sosial Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (TCHU).

¹⁷ Helios Awards diberikan setahun sekali oleh BP untuk memberi penghargaan kepada karyawan atau pihak ketiga yang telah menerapkan nilai-nilai BP di dalam praktik. TCHU adalah pemenang global di antara semua proyek yang dinominasikan oleh lembaga BP di seluruh dunia.

dengan Pendirian *Global Development Alliance for Health* dengan USAID, merupakan upaya yang sangat penting.

Peningkatan pendidikan dasar dan menengah juga telah mencapai hasil signifikan. Telah ada dukungan yang meningkat (misalnya pengisian lowongan dan pelatihan guru dan peningkatan infrastruktur) bagi sekolah-sekolah dasar di Tanah Merah, Onar, Sangga, Tofoi, Otoweri, Tomage, Weriagar, tari, Tomu dan Aranday, serta bagi sekolah menengah pertama di Tanah Merah dan Aranday. Nota Kesepahaman oleh BP dengan tiga organisasi keagamaan – YPK, YPPK, Muhammadiyah – telah mendatangkan guru baru, buku dan bahan pendidikan baru ke semua DAV. Lebih jauh lagi, Proyek juga telah menandatangani persetujuan dengan British Council untuk mendukung pemerintah daerah setempat dalam bidang perencanaan dan kapasitas pendidikan, mempromosikan dukungan masyarakat untuk pendidikan, dan mendirikan program beasiswa untuk pendidikan sekolah menengah. Tujuan-tujuan ini akan lebih dimantapkan dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Bulan Maret 2006 antara Bupati, Proyek dan ketiga organisasi keagamaan tersebut.

Namun, Panel sudah mengunjungi daerah itu selama lima tahun, kurun waktu yang cukup lama untuk melihat perubahan dan jelas terlihat di samping kemajuan yang diuraikan di atas, manfaat untuk desa-desa non-pemukiman-kembali (*non-resettlement villages*) belum cukup untuk membuat warga desa merasa bahwa Tangguh memberi kontribusi positif. Hal ini memang benar terutama bagi warga desa pantai utara yang yakin bahwa mereka mempunyai hak kepemilikan adat atas gas dan mereka melihat adanya manfaat yang lebih besar diberikan kepada desa-desa pemukiman kembali di pantai selatan.¹⁸ Meskipun Proyek telah memprakarsai

¹⁸ Ada klaim bahwa BP belum memenuhi kewajibannya menurut adat atau hak ulayat. Sebagai contoh, LARAP dan ISP menyatakan bahwa BP mengikuti Peraturan Menteri Agraria No 5 tahun 1999 dan Undang-undang Otonomi Khusus, yang menyatakan bahwa hukum adat harus dihormati bila mungkin, asalkan adat-adat ini tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Bupati Bintuni berpendapat sama. Beliau menyimpulkan bahwa isu-isu

infrastruktur khusus dan baru untuk desa-desa di pantai utara, misalnya pusat pelatihan keterampilan kerja, program air bersih dan infrastruktur pendidikan, tetap saja ada persepsi ketidakadilan. Meskipun persepsi ini mungkin akibat dari perumahan dan infrastruktur baru yang dibangun berdasarkan persyaratan LARAP, sebagai masalah nyata, hal ini harus ditangani.

Produksi akan dimulai kurang dari dua tahun lagi. Waktu tinggal sedikit untuk mengubah sikap negatif yang ada sebelum momen yang amat menentukan ini. Namun, Panel yakin bahwa dengan berfokus pada hasil-hasil beberapa bidang utama, dan dengan kerja sama Bupati, hampir semua pemuka masyarakat di wilayah Teluk Bintuni dapat diajak kerja sama untuk menyukseskan Proyek ini saat operasi dimulai.

Fokusnya harus pada pemberian manfaat dan komunikasi informasi yang lebih baik. Informasi publik dibahas di bagian XI di bawah ini. Meskipun tim ISP berinteraksi secara reguler dengan warga desa di DAV, metode komunikasi baru dengan warga desa lokal harus dicoba. Di antara pembawa berita terbaik untuk warga desa tentang manfaat Tangguh mungkin beberapa siswa Papua yang sekarang dilatih untuk melakukan pekerjaan teknis di operasi PNG. Jika siswa-siswa ini dibawa ke Teluk Bintuni, BP hendaknya mempertimbangkan untuk mengadakan rapat warga sehingga siswa-siswa ini dapat menjelaskan operasi LNG dan membantu menyiapkan warga desa menerima informasi tentang bagaimana tangguh akan mempengaruhi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Manfaat bagi warga desa pantai utara dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Pertama, Bintuni Bay Development Foundation (Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni), yang akan melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Panel sebelumnya, harus dibentuk tepat waktu. Yayasan ini akan mendanai infrastruktur di wilayah yang diidentifikasi oleh pemimpin setempat.

terkait hak-hak masyarakat dan kompensasi merupakan masalah serius. Bupati juga yakin bahwa BP harus sensitif terhadap masalah ini, tetapi penyelesaian permasalahan ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

Namun, masalah struktur dan pengelolaan telah menunda pendirian yayasan. Meskipun masalah ini penting, masalah ini hendaknya tidak menghalangi pendirian Yayasan. BP hendaknya bekerja sama dengan Bupati untuk membuat jadwal kerja untuk membentuk yayasan dan memulai kerja di tahun 2007. Hal ini penting jika hasil di tempat itu ingin dilihat pada saat permulaan produksi.

Kedua, BP hendaknya membuat upaya prioritas di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan penggunaan kayu yang tergeletak tak termanfaatkan dan yang membusuk begitu saja di lokasi LNG. Seperti yang dilaporkan Panel sebelumnya, ada ribuan pohon yang ditebang yang dapat digunakan sebagai sumber daya utama untuk perumahan dan konstruksi lain di desa-desa non-pemukiman-kembali (non-resettlement) di seluruh wilayah ini. Birokrasi di Jakarta telah menghentikan penggunaan kayu ini untuk semua tujuan. Syukurlah BP telah berbicara dengan sejumlah pejabat pemerintah dalam upaya memperoleh persetujuan yang diperlukan. Tetapi upaya yang lebih terkonsentrasi diperlukan. Dalam berkonsultasi dengan Bupati, BP hendaknya mengajukan permohonan kepada BPMIGAS, Departemen Energi, Departemen kehutanan, dan jika diperlukan, pejabat politik yang lebih tinggi, untuk membuka jalan buntu ini.

Ketiga, tim ISP hendaknya bekerja sama dengan pemimpin desa untuk mengimplementasikan CAP secara penuh dan efektif. Lampiran 4 adalah bagan yang menunjukkan pemanfaatan CAP di setiap DAV sejak dimulainya pada tahun 2004.¹⁹ CAP ini telah memberi peningkatan yang bermanfaat bagi DAV. Namun, dalam beberapa kasus, sebagian besar dana tidak terpakai. Meskipun mungkin ada ketidaksepakatan atau masalah proses yang menunda penggunaan dana CAP, semua pihak berkepentingan bahwa dana ini dipakai untuk meningkatkan kualitas desa daripada ditunda-tunda.

¹⁹ Masing-masing CAP mulai pada tahun 2004, kecuali Babo yang sudah mulai pada tahun 2003.

Keempat, BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk pengadaan listrik ke DAV non- pemukiman kembali. Hal ini akan segera meningkatkan taraf hidup masyarakat dan selalu mengingatkan masyarakat akan manfaat Tangguh. Manfaat sekunder pun akan tercapai, termasuk peningkatan keberaksaraan (literacy) dan pendidikan serta kualitas hidup. Desa-desa pemukiman kembali telah dialiri listrik sepenuhnya, baik untuk masing-masing rumah maupun jalan umum. BP hendaknya menjajaki penggunaan tenaga surya, pembangkit listrik tenaga disel atau pembangkit kombinasi untuk paling tidak mengaliri listrik beberapa fasilitas umum di desa-desa ini sebelum operasi mulai di tahun 2008.

Kelima, program air bersih untuk DAV pantai utara harus diselesaikan pada tahun 2007. Program,-program ini adalah di antara rekomendasi awal Panel, yang telah disetujui BP tetapi belum diselesaikan. Ada beberapa keluhan tentang tidak memadainya program air bersih di DAV pantai utara. Tetapi, program-program ini belum diselesaikan. Panel sepenuhnya yakin bahwa manfaat air bersih sangatlah mendasar dan meningkatkan kondisi hidup masyarakat; oleh karena itu perlu mendapat prioritas tinggi. Jika fasilitas air bersih di desa-desa ini tidak memadai setelah dipasang, maka instalasinya perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan selanjutnya. Namun tidak ada alasan bagi tidak terselesaikannya program-program awal ini di tahun 2007.

Keenam, meskipun BP telah berusaha menerapkan program pendanaan mikro untuk mendukung pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bintuni, program ini belum berjalan mantap. Budaya menabung dan keengganan pemimpin eksternal untuk masuk ke wilayah ini merupakan kendala. Namun, pengalaman sukses program pendanaan mikro di bagian lain dunia ini, misalnya Grameen Bank di Bangladesh, yang membuat Muhammad Yunus memenangkan Nobel Perdamaian 2006, menunjukkan bahwa kendala ini dapat diatasi dan program ini dapat

berhasil baik. Jadi, BP hendaknya terus memperbarui upayanya untuk mendirikan program usaha mikro di wilayah Teluk.

Panel mengakui bahwa Panel telah merekomendasikan banyak tindakan prioritas tinggi untuk menjamin manfaat langsung bagi warga setempat. Panel menganggap bahwa tindakan ini penting bagi kelangsungan Proyek. Permulaan operasi akan dipandang oleh banyak orang sebagai tanggal simbolis untuk memvonis apakah Tangguh telah menyejahterakan warga di sekitarnya atau tidak. Oleh karena itu, buah dari investasi ini perlu dibuat berfungsi dan dapat dilihat oleh semua orang menjelang akhir tahun 2008.

B. Kepala Burung

Terlepas dari keuntungan yang diberikannya kepada kawasan Teluk Bintuni yang berdekatan dengannya, Tangguh juga perlu dipandang mampu menciptakan perkembangan positif di kawasan Kepala Burung yang lebih luas dan di seluruh Papua. Dalam jangka panjang, tidak akan tersedia pekerjaan untuk mempertahankan persepsi ini. Panel yakin Tangguh dapat memberi kontribusi besar di dalam tiga bidang: program pengembangan dunia usaha, kesehatan, dan pendidikan tinggi.

Program BP untuk perawatan kesehatan memiliki potensi yang besar untuk kawasan tersebut. Pada bulan Juni 2006, BP menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan USAID dalam rangka menciptakan Prakarsa Pembangunan Kepala Burung. Hal ini melanjutkan perkembangan yang dihasilkan Aliansi Kepala Burung sejak tahun 2002-2004. Selain menggalang program-program pendidikan dan pemerintahan, Prakarsa memanfaatkan sumber daya dari program *Basic Human Service* USAID dan Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh BP untuk memerangi HIV/AIDS, TBC, dan malaria, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di seluruh kawasan Kepala Burung. BP akan menyumbangkan 3 juta USD untuk program-program

kesehatan sebagaimana digariskan Nota Kesepahaman yang akan berlanjut hingga tahun 2009 tersebut. Seperti diketahui, penyebaran HIV/AIDS di Papua luar biasa tinggi. Dengan begitu, sangatlah penting utamanya jika Aliansi memprioritaskan pendidikan dan pencegahan AIDS. Lebih jauh lagi, BP berencana mengembangkan program pemasaran-sosialnya yang berhasil itu untuk memerangi malaria dan TBC dari DAV hingga ke kawasan Kepala burung yang lebih luas.²⁰

Sehubungan dengan pendidikan, partisipasi BP dengan USAID dalam Prakarsa Pendidikan Kepala Burung akan membantu menyebarkan manfaat berupa peningkatan pendidikan dasar dan menengah ke lebih banyak kawasan yang telah dimulai dari DAV. Program yang akan mendapat sediaan dana dari BP sebesar 1,5 juta USD selama tiga tahun ini akan berfokus pada pembangunan kapasitas pemerintahan lokal untuk mengatur dan melaksanakan rencana-rencana pendidikan dan pada peningkatan kualitas guru dan sumber daya pendidikan.

Secara terpisah, tetapi juga tak kalah pentingnya, sebelumnya Panel telah merekomendasikan agar BP memberikan beasiswa di Cendrawasih dan UNIPA, dua universitas di Jayapura dan Manokwari.²¹ Sejauh ini, selain upaya untuk mengembangkan pelatihan guru sebagai bagian dari Prakarsa Pendidikan Kepala Burung USAID, tidaklah jelas bahwa Tangguh telah memberi dampak berkelanjutan terhadap pendidikan tinggi Papua.

Kebutuhan mendidik warga Papua dalam bidang-bidang yang bisa memberikan manfaat bagi kawasan itu adalah salah satu permintaan terbesar dari Gubernur, Menteri Perikanan Numberi maupun para pejabat tinggi lainnya. Tak diragukan lagi, BP bisa memberi dampak

²⁰ Lihat Lampiran 5 untuk informasi lebih lanjut tentang hasil sukses program pemasaran-sosial Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (TCHU).

²¹ Lihat Laporan Panel yang Pertama di Oktober 2002, di halaman 18-19 dan Laporan Panel yang Keempat yang diserahkan pada Maret 2006, di halaman 26.

positif dan berkelanjutan terhadap Papua dengan menyokong pemberian akses yang lebih baik terhadap pendidikan tinggi bagi warga Papua. Yang tak kalah pentingnya, Tangguh bisa dipandang oleh semua pihak yang melewati institusi-institusi ini sebagai Proyek yang menyumbang program-program penting ini. Oleh karena itu, Panel memohon agar BP membuat beasiswa “Tangguh” bagi siswa-siswi Papua di kedua universitas itu yang berhak mendapatkannya, di bidang-bidang yang paling penting bagi Papua, semisal pertambangan, minyak dan gas, perikanan, dan administrasi bisnis. Terkait dengan hal ini, BP harus membiayai pendidikan atau profesor “Tangguh” di masing-masing sekolah ini dalam bidang-bidang tersebut di atas atau subyek-subyek lain yang dipilih Rektor sebagai hal paling penting untuk melatih para calon pemimpin Papua.

Pemberdayaan bisnis bisa juga memberikan perbedaan besar bagi rakyat Kepala Burung. Tangguh bisa menjadi kontribusi penting di kawasan ini, baik itu dengan mendorong pengadaan dari bisnis-bisnis lokal dan dengan mendukung pelatihan orang-orang untuk perusahaan bisnis. Pertama-tama, pengadaan lokal belum meningkat sejak laporan Panel terakhir; ini merupakan kekhawatiran yang dirasakan banyak pihak di kawasan itu, termasuk Panel. Tentu saja sulit membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjamin kualitas produk dengan harga yang pantas, tetapi harus diambil upaya-upaya afirmatif untuk mendorong BP dan kontraktornya untuk menggunakan produk-produk dan layanan lokal jika memungkinkan. KJP dan para subkontraktor utamanya harus berkomitmen dalam hal AMDAL.

Kedua, sebagai bagian dari Strategi Diversifikasi Pengembangan yang digalang BP, BP telah menyetujui sebuah Nota Kesepahaman dengan IFC dan UNDP untuk memberdayakan bisnis di kawasan Kepala Burung.²² IFC telah mulai melatih usaha-usaha kecil dalam

²² Strategi Diversifikasi pengembangan adalah komponen ISP BP untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan beragam.

pengadaannya; kesehatan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan; perencanaan bisnis; dan praktik-praktik keuangan. Telah diadakan sesi-sesi pelatihan yang banyak diikuti masyarakat di Bintuni, Sorong, dan FakFak. Program tersebut dijadwalkan akan berjalan selama dua tahun. Panel akan bertemu dengan pimpinan program IFC, dan akan mendorong upaya ini sepenuhnya. Upaya ini berpotensi besar, meskipun mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Ia perlu dievaluasi sebelum berakhir untuk menentukan apakah diperlukan pembaharuan atau modifikasi. Lebih jauh lagi, BP harus berusaha menghubungkan pihak-pihak yang telah merampungkan program dengan para kontraktornya demi mendorong pengadaan tambahan.

Rekomendasi

- **Perasaan perlakuan yang tidak adil desa-desa pantai utara belum berhasil ditanggapi secara memadai. BP seharusnya mempercepat manfaat-manfaat ke pantai utara dengan:**
 - **mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni secara tepat waktu.;**
 - **berusaha memperoleh persetujuan yang diperlukan di Jakarta bagi penggunaan kayu gelondongan yang tergeletak tak terpakai dan memburuk di lokasi LNG;**
 - **terus bekerja dengan para pemimpin desa-desa untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Masyarakat (“CAP”) secara penuh dan efektif;**
 - **bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk pengadaan listrik ke DAV non-pemukiman kembali**
 - **melaksanakan program air bersih untuk desa-desa di pantai utara;**
 - **memperbarui upaya-upayanya untuk mendirikan program usaha mikro dan keuangan mikro di wilayah Teluk Bintuni.**
- **BP seharusnya terus bekerja dengan Bupati Bintuni untuk mendukung upaya-upaya pendidikan di Desa-desa Yang Terkena Dampak Langsung (“DAV”) dan**

seharusnya mengembangkan pekerjaan Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh ("TCHU") guna membantu mengendalikan malaria, diare, kekurangan gizi dan HIV/AIDS di seluruh wilayah Teluk Bintuni.

- **BP should invest in higher education in the Bird's Head region by creating "Tangguh" scholarships for deserving Papuan students at the University of Cenderawasih, UNIPA or other institutes and should also endow "Tangguh" chairs or professorships at such schools in subjects important for training future leaders of Papua.**
- **BP seharusnya memfasilitasi pembangunan usaha dan pemberdayaan di kawasan Kepala Burung dengan mendorong para kontraktornya untuk meningkatkan pembelian dari usaha setempat dan terus mendukung pelatihan dunia usaha di kawasan Kepala Burung.**

VIII. Koordinasi dengan Pemerintah Lokal dan Regional

Setahun terakhir ini telah menjadi tahun perubahan dan ketidakpastian dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. Di tingkat kabupaten, meskipun Bupati dilantik pada bulan November 2005, pemerintahannya baru mulai terlihat bekerja selama tahun 2006. Dengan demikian, Panel merekomendasikan agar dukungan untuk dan koordinasi dengan Bupati dilaksanakan sebaik mungkin. Pada bulan Maret 2006, BP membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati untuk membangun mekanisme koordinasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi, dan pemerintahan. Namun, koordinasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Panel bertemu dengan Bupati dan tim seniornya dan merasa terdorong oleh keseriusan Bupati akan tujuan dan pemahaman beliau atas peran BP dan pemerintah daerah. Dikatakan, pemerintahannya kian dituntut untuk berfungsi secara efektif; kalau tidak, prestasi yang diraihinya hanya sedikit dan BP akan ikut disalahkan.

Untuk mencapai tujuan itu, BP membuat Nota Kesepahaman dengan CLGI untuk mendukung kemampuan pemerintahan di Bintuni. Program yang mendapat dukungan penuh dari Bupati itu akan memperkuat pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan dan manajemen

strategi, penganggaran, manajemen keuangan, pembuatan draf Perda, dan pemberian layanan umum mendasar. Nota Kesepahaman ini direncanakan akan berlaku selama 2007. Ini merupakan program yang amat penting, dan Panel mendukungnya dengan sepenuh hati.

Pada tingkat regional, pemilihan Gubernur IJB pada bulan Maret, dan pelantikannya pada bulan Juli, benar-benar memantapkan IJB sebagai provinsi tempat beroperasinya Tangguh. Meskipun masih terdapat beberapa perbedaan mengenai legitimasi provinsi – utamanya oleh MRP – Gubernur dan badan pembuat undang-undang menjalankan fungsinya dan didukung oleh pemerintah pusat. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan kedua provinsi itu berlanjut hingga Papua akan diperlakukan sebagai sebuah unit perekonomian tunggal dengan banyak kawasan administratif. Meskipun hal ini mungkin terlihat sangat gamblang, masih saja ada banyak persoalan yang belum tuntas.

Melalui berbagai pembahasan dengan Menteri-menteri terkemuka Pemerintah Indonesia yang menjadi anggota Tim Koordinasi Papua, Panel mengetahui bahwa banyak yang belum diputuskan. Yang terpenting, alokasi dana Otonomi Khusus dari produksi sumber daya alam di Papua saat ini tidaklah dialokasikan sebelum kedua Gubernur mencapai kesepakatan mengenai rumusan yang bisa diterima, dan mendapat dukungan dari Tim Koordinasi Pemerintah Indonesia dengan rumus yang dapat diterima.²³ Kedua Gubernur menyatakan kepada Panel bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai kesepakatan semacam itu dan, berdasarkan pertemuan mereka pada tanggal 20 Pebruari 2007, tampaknya mereka mulai mendekati pencapaian tujuan itu. Tidaklah jelas bagaimana atau apakah pendapatan Otonomi Khusus ini akan didistribusikan jika tidak dicapai persetujuan. Meskipun sangat penting bagi kawasan tersebut, hal ini tidak

²³ Meskipun dana yang ditahan jumlahnya besar, dana ini hanyalah sebagian kecil dari total dana yang mengalir ke Papua dari Pemerintah Indonesia, sekitar 10%.

langsung mempengaruhi Tangguh hingga secepat-cepatnya tahun 2009, ketika pendapatan setelah pajak akan mulai mengalir ke provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten tersebut.

BP telah melakukan pekerjaan yang patut dihargai yaitu mengoordinasikan kegiatan-kegiatannya dengan pemerintah daerah di Jayapura. Sebagaimana bisa kita lihat, pekerjaannya dengan pemerintah di Manokwari masih baru berlangsung dan kurang lengkap. Tahun lalu Panel meminta BP meningkatkan kontakannya dengan para pejabat di Manokwari. Meskipun di sini telah didirikan sebuah kantor, baru sedikit yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Hal ini perlu ditanggulangi sesegera mungkin. Banyak anggota badan legislatif IJB yang tidak mendapatkan informasi terkini tentang program-program BP dan Tangguh untuk memberi manfaat bagi rakyat di kawasan itu. BP harus meningkatkan kehadirannya di Manowari, dan memiliki kemampuan penuh untuk menjadi perantara dengan Gubernur, para staf pentingnya dan para pimpinan badan legislatif di tingkat provinsinya. Para pemimpin ini harus terus mendapatkan informasi tentang program-program sosial dan ekonomi Tangguh dan mereka harus diajak berkonsultasi jika diperlukan. Gubernur dan para pemimpin lainnya harus diundang untuk mengunjungi Tangguh dan melihat kemajuan yang telah mereka capai di kawasan tersebut.

Di samping berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah, BP juga telah membuat sejumlah kesepakatan penting dengan LSM untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan pemerintah di IJB. Sebagaimana dibahas pada bagian VII, Manfaat bagi Teluk Bintuni dan Kawasan Kepala Burung, BP telah melanjutkan kolaborasinya dengan USAID melalui sebuah Nota Kesepahaman baru yang memfokuskan pada kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Prakarsa Pemerintah Kepala Burung ini membuat program tiga tahunan untuk menyediakan bimbingan teknis kepada para pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan parlemen di kawasan

tersebut. Program ini berfokus pada perencanaan daerah, penganggaran dan manajemen keuangan, transparansi, partisipasi, dan supervisi. Selain itu, kemitraan dengan proyek “Capacity 2015” UNDP, yang dimulai pada tahun 2004, dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam perencanaan mereka dengan meningkatkan kemampuan untuk meraih Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium,²⁴ telah memindahkan kantornya ke Manokwari untuk memfokuskan kegiatan-kegiatannya di IJB. Sayangnya, Nota Kesepahaman awal dengan provinsi Papua belum diubah untuk menunjukkan bahwa UNDP kini utamanya bekerja sama dengan IJB. BP harus segera berupaya meralat kelalaian ini. Panel mendorong program-program ini, yang masing-masing akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di kawasan Kepala Burung ini.

Rekomendasi

- **Sejak Gubernur IJB terpilih dan ibukota di Manokwari didirikan, BP seharusnya meningkatkan kehadiran komunikasinya di Manokwari, dan mempunyai kapasitas penuh untuk berhubungan dengan Gubernur, para pejabat kabinetnya dan para pemimpin dewan legislatif provinsi sehingga para pejabat pemerintah daerah senantiasa mengetahui program-program ekonomi dan sosial Tangguh dan dimintai nasihat bilamana perlu**
- **BP harus terus berkoordinasi secara erat dengan Bupati guna mendukung pembangunan kapasitas pemerintahan di Bintuni untuk membantu fungsi pemerintahan setempat secara efektif dan transparan, dan memperbaiki pemberian layanan-layanan publiknya, seperti kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.**
- **BP seharusnya juga terus mendukung pengembangan kapasitas dan transparansi di tingkat daerah dengan bekerja sama dengan USAID dan UNDP. Sejak UNDP memindahkan kantornya ke Manokwari, BP dan UNDP seharusnya mengubah Nota Kesepahaman (“NOTA KESEPAHAMAN”) dengan Papua untuk memasukkan IJB.**

²⁴ Proyek Capacity 2015 berusaha mencapai tiga Tujuan Pembangunan Milenium di Papua – mengentas kemiskinan, menjamin perlindungan lingkungan hidup dan memperkuat kemitraan global untuk pembangunan.

IX. Transparansi Arus Pendapatan ke Daerah ini

Transparansi aliran pendapatan dari proyek-proyek seperti Tangguh tetap menjadi masalah dan tantangan terus-menerus bagi BP. Indonesia belum bergerak menuju persetujuan EITI, tetapi telah mulai bekerja sama dengan proyek-proyek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (“IMF”) untuk mendorong adanya transparansi. Bekerja dengan pihak ketiga ini, BP harus terus mendorong transparansi secara umum dan khususnya mengadopsi EITI.

Transparansi dana publik juga diperlukan di tingkat regional dan lokal. Transparansi hendaknya menjadi elemen kunci di dalam semua program-program pengelolaan sipil yang didukung oleh BP, seperti halnya yang didukung oleh USAID, UNDP, CLGI, dan Bank Dunia. BP sedang menangani permasalahan ini dengan program manajemen pendapatan terpadu untuk mengoordinasikan aktivitas untuk meningkatkan kapasitas keuangan publik lokal dan regional serta mendorong transparansi keuangan publik nasional. Program ini adalah program penting yang hendaknya terus dilakukan sebagai tindakan prioritas selama masa proyek.

Meskipun telah dicapai sedikit kemajuan, Sekretariat EITI juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi di dalam EITI dan akan bekerja melalui kantor Bank Dunia di Jakarta untuk mempromosikan transparansi. Namun, Indonesia belum berpartisipasi di dalam pertemuan EITI bulan Oktober 2006, yang dirancang untuk mendaftar negara-negara peserta baru di dalam program ini. Seberapa pun rendahnya tingkat penerapan prinsip-prinsip EITI oleh Indonesia, BP hendaknya terus berupaya mendorong BPMIGAS, Menteri Energi dan pejabat-pejabat lain untuk mengumumkan informasi tidak rahasia tentang pemerolehan dan alokasi pendapatan dari Tangguh.

Di dalam perkembangan positif, pemerintah pusat telah menciptakan bagian baru di dalam lingkungan Departemen Keuangan (“MOF”) yang diperuntukkan bagi urusan keuangan

antara Pemerintah Indonesia (“GOI”) dan provinsi-provinsi, termasuk aliran pendapatan ke Papua. Lebih jauh lagi, IMF telah mulai bekerja dengan Departemen Keuangan untuk mengkaji ulang praktik pemerintah mengenai transparansi. Perkembangan ini menggembirakan jika ditinjau dari kaca mata pemerintahan yang baik dan dari segi transparansi. Panel juga membahas permasalahan ini dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (yang menjadi salah satu ketua Tim Koordinasi Papua), dan diberi pengarahan yang rinci dan menyeluruh mengenai masalah ini oleh kepala bagian yang baru ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik.

Pertama, meskipun formula dan alasan bagi pengalihan dan alokasi keuangan sulit dipahami, banyak data kunci telah dipublikasikan dan hendaknya tersedia bagi masyarakat umum. Tentu saja, bukan BP yang harus memublikasikan data ini, tetapi semua pihak mempunyai kepentingan bahwa semua angka tersedia dan dipahami. BP hendaknya mendorong dan mendukung bank Dunia, yang menyelenggarakan pengkajian tentang aliran pendapatan Papua tahun lalu²⁵ untuk mengumpulkan data pertahun dan menerbitkan analisisnya sehingga semua pembuat keputusan akan mempunyai pemahaman yang baik.

Kedua, telah terjadi peningkatan pendapatan yang luar biasa yang ditransfer dari Pemerintah Indonesia ke provinsi ini selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah akibat dari dana Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah (“DAU” dan “DAK”), yang rumusnya terkait langsung dengan pendapatan total yang diterima oleh Pemerintah Indonesia (yang telah meningkat secara signifikan, terutama dari peningkatan harga minyak).

Total transfer ke Papua sebagai akibat program desentralisasi ini hampir lipat tiga kali di dua tahun terakhir, dari Rp. 6,737 trilyun di tahun 2004 menjadi Rp 16,110 triliun (sekitar \$1,7

²⁵ Lihat Laporan Bank Dunia, “Papua Public Expenditure Analysis: Regional Financial and Service Delivery in Indonesia’s Most Remote Region,” dapat diperoleh dari www.worldbank.org/id.

milyar). Ini jumlah yang besar jika ditinjau dari total APBD Papua yang hanya sekitar Rp. 3,850 di tahun 2001.²⁶ Dana ini dialokasikan untuk kedua provinsi dan kota/kabupaten di bawahnya. Manajemen peningkatan pendapatan yang demikian besar merupakan tantangan bagi pemerintah, terutama bagi pemerintah yang baru dibentuk di Papua. Hal ini lebih menekankan pentingnya dukungan bagi program peningkatan transparansi, manajemen keuangan dan penganggaran.

Ketiga, meskipun ada rumus untuk mengalokasikan dana ini ke masing-masing provinsi, tetapi tidak ada standar legal untuk pembagian penempatan provinsi antara kedua provinsi ini. Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa mungkin Pemerintah Indonesia tidak akan mengalokasikan dana untuk kedua provinsi tersebut sebelum kedua Gubernur serta kedua DPRD Provinsi mencapai kesepakatan.

Lebih jauh, Pemerintah Indonesia menahan dana sumber daya alam Otonomi Khusus (yaitu, pendapatan minyak, gas dan tambang) dari kedua provinsi sampai kesepakatan di atas tercapai. Akibatnya, sampai saat ini, kedua provinsi baru menerima prosentase pendapatan minyak, gas dan pertambangan yang diterima oleh semua provinsi dengan dasar Otonomi Daerah (30% dari gas alam), bukannya presentasi yang dialokasikan dalam Otonomi Khusus (70% gas alam). Dasar hukumnya tidak jelas, dan akan menjadi konsekuensi besar bagi BP jika tidak selesai masalahnya sebelum pendapatan Tangguh mulai mengucur. BP hendaknya selalu berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebijakan ini. Namun, dari segi praktisnya, penahanan dana ini hendaknya mendorong kedua Gubernur untuk mencapai kesepakatan alokasi dana jauh sebelum Tangguh beroperasi.

Keempat, tetap diperlukan transparansi yang lebih besar mengenai pemerolehan dan alokasi pendapatan dari proyek-proyek sumber daya alam khusus, seperti Tangguh ini. Hal ini akan menjadi penting begitu operasi dimulai dan banyak pertanyaan bermunculan tentang aliran

²⁶ *Idem* halaman 31.

pendapatan Pemerintah Indonesia dari Proyek. BP menangani masalah ini sebagai bagian dari Program manajemen Pendapatan dan hendaknya terus difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran akan struktur dan tingkat aliran pendapatan dari Tangguh.

Rekomendasi

- **BP seharusnya melanjutkan dukungannya pada transparansi fiskal dan pemakaian Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (“EITI”) di kalangan pejabat pemerintah pusat senior dan seharusnya secara khusus mendorong BPMIGAS, Menteri Energi dan Menteri Keuangan serta para pejabat lain untuk mengumumkan semua informasi pemerolehan dan alokasi pendapatan yang tidak rahasia dari Tangguh.**
- **BP seharusnya mendorong Bank Dunia, yang melaksanakan penelitian rintisan mengenai arus pendapatan pada tahun 2005, untuk mengumpulkan data tahunan yang ada dan menerbitkan sebuah analisa sehingga para pembuat kebijakan di Papua akan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai sumber-sumber dan penggunaan transfer pendapatan dan fiskal.**
- **BP seharusnya memastikan bahwa transparansi adalah salah satu elemen kunci dalam dukungannya pada program-program yang ada sekarang ini dan di masa mendatang dengan USAID, UNDP, Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (“CLGI”) dan Bank Dunia yang dirancang untuk memperbaiki pemerintahan sipil, manajemen fiskal dan penganggaran di Papua.**
- **BP seharusnya berusaha agar senantiasa mengetahui bagaimana transfer pendapatan menurut kebijakan Otonomi Khusus berkembang, terutama yang berkaitan dengan transfer pendapatan gas alam.**

X. Lingkungan

Dulu Panel telah memperhatikan pentingnya isu-isu lingkungan hidup yang semakin meningkat saat Proyek mendekati fase operasi. Dengan aktivitas-aktivitas konstruksi di pantai dan lepas pantai yang beroperasi penuh, isu-isu ini sekarang merupakan prioritas puncak. Panel bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup, serta dengan LSM-LSM lingkungan hidup, yang semuanya pada umumnya bersikap positif pada dukungan BP dan kepatuhannya hingga saat ini

pada persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Namun demikian, terdapat isu-isu signifikan yang berkaitan dengan keprihatinan lingkungan hidup.

Pertama, dalam menanggapi rekomendasi Panel untuk membentuk kontrol lingkungan hidup dan prosedur tinjauan bagi para kontraktornya, BP telah mengembangkan sebuah sistem pelacakan untuk memantau pelaksanaan AMDAL setiap minggu. BP juga telah memulai pelatihan dan sosialisasi lingkungan hidup bagi personil kontraktor. Ini adalah langkah-langkah yang berguna. Personil lingkungan hidup senior BP seharusnya memantau secara teratur sistem pelacakan pelaksanaan AMDAL untuk memastikan bahwa sistem tersebut mencakup semua wilayah signifikan dan meninjau hasil-hasilnya pada basis kekinian sehingga kesenjangan yang ada dapat diketahui dan dikoreksi dengan tepat waktu. Segala kekurangan seharusnya segera ditunjukkan kepada KJP dan sub-kontraktor mana saja yang bertanggung jawab, bersama dengan BP yang seharusnya menyusun sebuah rencana untuk koreksi segera.

Kedua, Panel mengulangi lagi pentingnya mengumumkan dan mendorong GOI untuk mengumumkan hasil-hasil dari semua inspeksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh MOE dan tanggapan-tanggapan dari BP. Ketika isu ini disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan, Panel mendapatkan informasi bahwa semua laporan mengenai inspeksi pasca permulaan operasi akan diumumkan. Sementara inspeksi-inspeksi sebelum operasi hendaknya juga diumumkan, kebijakan yang dijelaskan tersebut hendaknya segera berlaku. BP hendaknya memastikan bahwa semua laporan MOE setelah permulaan operasi diumumkan. BP sekarang ini seharusnya juga mengumumkan, setelah berkonsultasi dengan MOE, semua tanggapan tertulis BP terhadap laporan-laporan MOE dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengoreksi segala kekurangan. Demikian pula, BP seharusnya mengumumkan tinjauan, audit atau laporan yang berkaitan

dengan lingkungan hidup, seperti yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia, dan tanggapan-tanggapan BP pada perkara itu.

Ketiga, karena lalu lintas di Teluk dari kapal-kapal konstruksi dan feri-feri pekerja yang sudah ekstensif, dan karena lalu lintas *tanker* LNG yang akan mulai berlangsung dalam waktu kurang dari dua tahun lagi, adalah sangat penting bagi BP untuk mengenakan kontrol-kontrol yang ketat untuk meminimumkan kemungkinan kecelakaan laut dan mencegah segala pembuangan yang signifikan di Teluk. Hal ini terutama bisa berbahaya apabila pembuangan minyak atau air pemberat merusak perikanan di wilayah Proyek. AMDAL mengharuskan semua kapal untuk memenuhi standar-standar internasional, termasuk Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)*), namun pelaksanaan persyaratan ini merupakan sebuah tantangan.

BP seharusnya berusaha sebaik mungkin mencegah dan mengelola tumpahan dari kapal di sekitar wilayah Proyek. Ini barangkali meliputi audit lingkungan hidup pada kapal-kapal sub-kontraktor; “monitor” lingkungan hidup yang ditempatkan di dok kombo; dan sebuah sistem penghargaan bagi praktik-praktik lingkungan hidup guna meningkatkan tindakan yang ramah lingkungan. Terutama, BP harus melaksanakan kontrol yang ketat – termasuk semua perjanjian internasional – pada semua kapal yang akan berlabuh di lokasi, apakah kapal tersebut milik BP atau afiliasinya atau bukan. Untuk mengendalikan pembuangan air pemberat, BP hendaknya mengharuskan semua kapal yang berkaitan dengan proyek untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Pengelolaan Air Pemberat Kapal & Endapan, bahkan sebelum entri Konvensi diberlakukan. Adalah sangat penting bagi BP untuk bekerja dengan BPMIGAS untuk memakai standar-standar ini.

Begitu pula, pengelolaan lumpur limbah pengeboran dan serpihan yang dihasilkan dari pengeboran sumur gas harus ditangani dengan cara yang meminimalkan segala perusakan atau gangguan pada nelayan setempat. AMDAL menetapkan bahwa, selama secara teknik dan secara geologis layak dikerjakan, opsi yang dipilih untuk pengelolaan limbah dan serpihan ini adalah injeksi ulang (“DCRI”), sebuah praktik yang dari segi lingkungan hidup lebih baik daripada pembuangan keluar kapal semua limbah lumpur dan serpihan pengeboran. Karena pembuangan keluar kapal menghadirkan risiko dampak negatif terhadap industri perikanan dan wilayah-wilayah hutan bakau Teluk yang sensitif, maka BP menentang pembuangan keluar kapal. Belum lama ini MOE menyetujui penggunaan DCRI

Namun, standar industri saat ini untuk DCRI memasukkan pengecualian untuk “pembuangan lubang puncak (*top hole discharge*)” dari sumur pertama yang dibor dalam setiap anjungan. Lubang puncak adalah bagian paling atas dari lubang pengeboran. Apabila MOE menyetujui pembuangan lubang puncak (ketimbang injeksi ulang), akan menjadi penting bagi proyek untuk memantau secara ketat dampak-dampak yang berkaitan dengan pembuangan lubang puncak. Program pemantauan seharusnya meliputi survei dasar laut secara berkala di sekitar instalasi anjungan. Proyek seharusnya terus mengevaluasi opsi-opsi alternatif bagi pembuangan lubang puncak apabila ditemukan bahwa pembuangan mengakibatkan dampak-dampak merugikan yang signifikan.²⁷

Keempat, BP mendukung *Rapid Ecological Assessment of Bintuni Bay* mamalia laut dan reptil laut yang dipimpin oleh *APEX Environmental*. Survei ini mengungkapkan bahwa Teluk Bintuni – termasuk daerah di sekitar Babo dan lokasi LG – merupakan kubu atau “*hotspot*” bagi Lumba-lumba Berpunggung Bungkuk Indo-Pasifik – lumba-lumba Sousa – yang dilindungi di

bawah hukum Indonesia dan terdaftar di bawah beberapa konvensi dan perjanjian internasional.²⁸ Spesies Sousa termasuk dalam Daftar Merah (“*redlist*”) (Status Spesies Yang Terancam Punah dan/atau Rentan) menurut Persatuan Konservasi Dunia (“IUCN”) yang mencatat bahwa “karena spesies ini hidup sangat berdekatan dengan wilayah-wilayah industri, tercemar, dan berpenduduk sangat padat, maka lumba-lumba berpunggung bungkuk ini sangat rentan.”²⁹ Karena kerentanan ini, spesies sensitif ini harus diberi diperhatikan dan tidak boleh dibahayakan.

AMDAL tidak memasukkan rencana pengelolaan untuk mamalia dan reptil laut (kura-kura laut). Setelah konsultasinya dengan tim pakar Mamalia Laut-nya, Panel merekomendasikan agar BP membentuk sebuah rencana pemantauan dan manajemen jangka panjang yang mengurangi dampak yang kurang menguntungkan pada lumba-lumba Sousa dan mamalia laut lainnya serta reptil. Rencana tersebut seharusnya segera dikembangkan, karena semua lalu lintas kapal di Teluk dapat membahayakan mamalia dan reptil laut baik karena polusi maupun tabrakan langsung. BP hendaknya segera mulai mendidik para kapten kapal tentang perlunya mengambil tindakan untuk menghindari kontak dan hendaknya mendorong semua kapal yang melayani Tangguh untuk memiliki awak kapal yang ditunjuk untuk mengawasi mamalia dan reptil laut sehingga dapat diambil tindakan penghindaran. Dalam jangka panjang, Sousa barangkali menjadi “spesies indikator” yang tepat untuk memantau dampak-dampak Tangguh pada lingkungan Teluk Bintuni.

Kelima, ketika operasi dimulai, CO₂ akan dilepaskan ke atmosfer. CO₂ adalah sekitar 12,5% dari arus gas reservoir, yang bisa mewakili sedikitnya 1,8Tcf CO₂ selama masa hidup

²⁷ Apabila dampak-dampak yang merugikan berasal dari pembuangan lubang puncak, Panel merekomendasikan agar BP mengevaluasi alternatif-alternatif lain untuk pembuangan lubang puncak guna menentukan apakah terdapat alternatif-alternatif ekonomi untuk pembuangan lubang puncak yang dari segi lingkungan hidup menguntungkan.

²⁸ Lihat Apex International, “Bintuni-Berau Bay Rapid Ecological Assessment (REA): Mamalia Laut dan Reptil Laut, di halaman 27.

²⁹ *Idem* halaman 28.

Proyek. BP telah meninjau berbagai macam mekanisme pembuangan CO₂ dan menyimpulkan bahwa injeksi ulang adalah opsi yang secara teknis paling layak untuk dikerjakan. Sebelumnya BP mengusulkan sebuah rencana untuk penilaian teknis injeksi ulang CO₂ yang ditolak oleh BPMIGAS dalam Rencana Pembangunan. Searah dengan kebijakan lingkungan hidup BP Group, BP terus meminta agar program ini dimasukkan. Ada indikasi bahwa BPMIGAS mungkin mengizinkan program pengawasan untuk menunjukkan kelayakan teknis dan komersial, sebelum memutuskan apakah mengembangkan tangkapan CO₂ sebagai sebuah proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (“CDM”) sesuai dengan Protokol Kyoto. Meskipun CO₂ akan dilepaskan setidaknya selama empat tahun pertama masa produksi, Panel sangat mendukung BP dalam upaya-upayanya mengembangkan injeksi ulang sebagai sebuah strategi jangka panjang untuk pembuangan CO₂ dan mengumumkan hal ini kepada para pejabat GOI.

Lebih luas lagi, BP telah mendukung beberapa proyek penting yang berhubungan dengan pembangunan kapasitas Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan bersama dengan *The Nature Conservancy*, *Conservation International*, *World Wildlife Fund* dan yang lain-lainnya, BP telah membantu mendirikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Pelatihan Papua (“CTRC”), yang akan memperoleh pendanaan dari Program Lingkungan Hidup PBB (*UN Environmental Programme*) pada tahun 2007. Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati Tangguh (*Tangguh Biodiversity Action Plan*), yang diuraikan secara singkat dalam Lampiran 6, juga mendukung Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bintuni (*Bintuni Bay Nature Reserve Management Plan*); Penilaian Kesehatan Perikanan (*Fisheries Health Assessment*); pengumpulan data flora dan fauna; dan survei mamalia dan reptil laut. Program-program ini akan berakhir pada tahun 2007. Sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan Panel, aktivitas-aktivitas ini merupakan sumbangsih yang penting

dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup Papua. Panel sangat mendukung BP untuk melanjutkan upaya-upaya ini.³⁰

Rekomendasi

- **Personil lingkungan hidup senior BP dan juga personil lingkungan hidup senior para kontraktornya seharusnya memantau secara teratur sistem pelacakan pelaksanaan AMDAL untuk memastikan bahwa sistem tersebut mencakup semua wilayah signifikan dan meninjau hasil-hasilnya pada basis kekinian sehingga kesenjangan yang ada dapat diketahui dan dikoreksi dengan segera. Segala kekurangan seharusnya segera ditunjukkan kepada KJP dan sub-kontraktor mana saja yang bertanggung jawab, bersama dengan BP yang seharusnya menyusun sebuah rencana untuk koreksi segera.**
- **BP hendaknya mempublikasikan semua laporan ke Departemen Lingkungan Hidup, tanggapan tertulis BP kepada Departemen Lingkungan Hidup, dan hasil audit serta laporan terkait, seperti halnya laporan-laporan Bank Pembangunan Asia, dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Di samping itu, BP hendaknya mengumumkan segala tindakan yang diambil untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan lingkungan hidup.**
- **BP hendaknya mengenakan kontrol yang ketat untuk mencegah pembuangan limbah yang signifikan yang berhubungan dengan Proyek, termasuk upaya yang sebaik mungkin untuk mencegah dan mengelola segala tumpahan dari kapal yang bisa merusak perikanan di wilayah Proyek. Dengan demikian, BP seharusnya melaksanakan semua standar perjanjian internasional pada semua kapal yang berlabuh di lokasi.**
- **Dalam konsultasinya dengan tim pakar Mamalia Lautnya, BP seharusnya melembagakan sebuah rencana pemantauan dan manajemen jangka panjang yang mengurangi dampak kurang menguntungkan pada lumba-lumba Sousa dan mamalia laut lainnya serta reptil. Sebagai bagian dari upaya ini, BP seharusnya segera mulai mendidik kapten kapal tentang perlunya mengambil tindakan guna menghindari kontak langsung dengan kehidupan laut.**
- **BP hendaknya terus mendesak GOI untuk memberikan izin penangkapan dan injeksi ulang CO₂ sedini mungkin sebagai strategi jangka panjang untuk pengelolaan emisi CO₂ dari Tangguh.**
- **Dengan para mitra lingkungannya, BP hendaknya melanjutkan Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati yang berhasil yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan**

³⁰ Dengan demikian, seperti yang dikemukakan di depan, BP hendaknya bekerja sama dengan Bupati untuk sistem peraturan yang efektif untuk mengendalikan kapal pukat dan melestarikan ikan di Teluk Bintuni.

keanekaragaman hayati, penilaian kesehatan perikanan, survei flora dan fauna dan perlindungan pohon bakau.

XI. Informasi Publik

Sebuah proyek besar dan rumit seperti Tangguh, yang dikembangkan di lingkungan sosial terpencil, membutuhkan program informasi publik yang komprehensif. Program ini seharusnya didasarkan pada pendekatan konseptual terpadu dengan mempertimbangkan tantangan teknis dan logistik. Ada beberapa audiensi sasaran. Pertama, Teluk Bintuni, dimana tujuan utamanya adalah presentasi yang efektif, dengan jangkauan yang lebih luas serta intensif, termasuk radio, selebaran, dan brosur. Kedua, provinsi, dimana audiens sasarannya adalah pejabat pemerintah dan politik, masyarakat sipil, media lokal dan bupati lainnya, dimana radio lokal atau televisi dan koran membentuk opini publik. Dan ketiga, Jakarta, dimana sasarannya adalah penerbit media nasional dan koresponden dari media internasional, dimana keterangan pers secara teratur dan kunjungan ke lapangan sekali-kali dibutuhkan. Ketika fase operasi dimulai, media dari ketiga tingkat ini harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Tangguh dan peranannya dalam mendukung pengembangan daerah tersebut dan Indonesia pada umumnya. BP telah mencapai kemajuan berarti dalam mengembangkan penyebaran informasi publik, namun tetap membutuhkan upaya lebih. Penduduk setempat dan pembuat opini di Manokwari tetap tidak menyadari sebagian besar kegiatan dan program Tangguh. Radio lokal dan koran bulanan di wilayah Teluk Bintuni telah sukses di daerah teluk dan seharusnya dikembangkan.

Hal yang sangat diperlukan adalah meningkatkan penyebaran informasi di Manokwari, ibu kota IJB. Dapat dipahami bahwa BP tidak fokus pada ibukota wilayah terlebih dulu karena tidak secara langsung bertanggung jawab atas Tangguh. Panel sebelumnya juga tidak

menyarankan adanya upaya media apapun di Manokwari. Namun, karena Manokwari sekarang menjadi ibukota provinsi, maka dibutuhkan komunikasi yang lebih baik. Mekanisme spesifiknya bisa meliputi pembuatan program radio pada stasiun-stasiun yang ada, mungkin juga di Manokwari bisa menggunakan beberapa program yang dikembangkan untuk digunakan di teluk Bintuni; penyebaran koran bulanan di Manokwari atau penerbitan edisi regional dengan fokus yang lebih luas; atau penerbitan artikel atau iklan pada koran yang ada, seperti Papua Barat Pos, Radar Sorong dan Cahaya Papua di Manokwari.

Bagi daerah Teluk Bintuni, radio, khususnya radio interaktif lokal, mempunyai potensi terbesar untuk memberikan informasi pada penduduk lokal dan melibatkan mereka pada kegiatan proyek tersebut. BP harus terus menggali cara memperluas siaran radio pantai utara dan selatan, misalnya dengan penyiaran program yang lebih menghibur dan interaktif, namun tetap fokus pada kegiatan Tangguh dan diskusi.

Selain itu, koran bulanan, yang terutama untuk penduduk asli Teluk, harus didistribusikan di seluruh wilayah kerja LNG dan pusat base camp Babo untuk para pekerja, dan harus berisi artikel-artikel atau informasi yang berguna bagi pembaca ini. Brosur bergambar dan/atau video yang berisi permasalahan tunggal untuk digunakan tim Hubungan Masyarakat juga harus digunakan jika ada isu penting yang harus dikomunikasikan kepada khalayak lokal: misalnya demobilisasi tenaga kerja.

Terakhir, BP harus memberi informasi media Jakarta dengan lebih baik. Meskipun telah ada beberapa artikel, tetapi selayaknya ada aliran informasi dari BP ke pers Jakarta, dalam bentuk keterangan pers, video atau wawancara, yang menggambarkan pencapaian penting Proyek, atau terfokus pada manfaat tertentu, misalnya Puskesmas atau sekolah dan guru baru.

Liputan kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman tentang manfaat soal dan ekonomi dari tangguh di antara pemimpin Papua dan Indonesia.

Rekomendasi

- **Sejak Manokwari menjadi ibukota daerah provinsi IJB, BP seharusnya meningkatkan penyebaran informasi di Manokwari melalui radio, artikel surat kabar dan iklan atau media yang lainnya.**
- **BP seharusnya terus mengembangkan komunikasi di Teluk Bintuni, dengan radio pantai utara dan selatan, yang bisa memfokuskan pada diskusi mengenai aktivitas-aktivitas Tangguh dengan acara interaktif; surat kabar bulanan, yang seharusnya disebar di seluruh lokasi LNG dan base camp Babo; dan brosur bergambar atau video, yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan isu-isu penting ke audiensi setempat yang luas.**
- **BP seharusnya menginformasikan dengan lebih baik media nasional di Jakarta tentang Tangguh untuk mendorong pemahaman mengenai manfaat-manfaat ekonomi dan sosial Proyek di kalangan para pemimpin opini Indonesia.**

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERORANGAN DAN BADAN YANG DIAJAK BERKONSULTASI

KONSULTASI SELAMA 2006 DICETAK TEBAL

Pejabat Pemerintah: Indonesia

Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian

H.E. Soemadi Brotodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat*³¹

N.T. Dammen, Kuasa Usaha, Kedutaan Indonesia di London*

Ibnu Hadi, Konsul, Divisi Ekonomi, Kedutaan Indonesia di Washington, D.C.*

Mohamad Ikhsan, Penasihat Senior, Kementerian Koordinator Perekonomian

Sri Mulyani Indrawati, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*

Gellwynn Jusuf, Penasihat Sosial Ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan

Manuel Kaisepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*

Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinator Perekonomian*

Nabiel Makarim, Menteri Lingkungan Hidup*

Mardiasmo, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan

Mohammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri

Agung Mulyana, Direktur, Departemen Dalam Negeri

Dr. Daeng Mochamad Nazier, Direktur Jendral, Departemen Dalam Negeri

A. Sidick Nitikusuma, Penasihat Eksekutif Senior, BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)*

Freddy Numberi, Menteri Kelautan & Perikanan

Progo Nurdjaman, Sekretaris Jendral, Departemen Dalam Negeri

I Made Pastika, Kapolda Bali, mantan Kapolda Papua*

Agus Purnomo, Pembantu Khusus Menteri, Kementerian Lingkungan Hidup

Mayjen Setia Purwaka, Kepala Urusan Papua, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan*

Yanuardi Rasudin, Deputi Menteri, Kementerian Lingkungan Hidup

Dr. Sodjuangon Situmorang, Direktur Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri

Djoko Soemaryono, Sekretaris Jendral, Kementerian Koordinator Politik & Keamanan

Dr. Ir. Sudarsono, Direktur Jendral, Departemen Dalam Negeri

H.E. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan

Rachmat Sudibjo, Ketua, BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)*

Yoga P. Suprpto, Manajer Proyek, Pertamina*

Benny P. Suryawinata, Asisten Deputi Urusan Luar Negeri untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan*

Dr. I Made Suwandi, Departemen Dalam Negeri*

Iin Arifin Takhyhan, Direktur Jendral Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*

Kardaya Warnika, Ketua, BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)*

Ir. Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup

³¹ * berarti yang bersangkutan tidak lagi menduduki posisi yang disebutkan

Jendral Yudhi, Deputy Ketua, LEMHANAS*
Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan*
Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jendral Nurdin Zainal, Pangdam Papua*

Pejabat Pemerintah: Papua

Abraham O. Atururi, Gubernur Irian Jaya Barat

Kolonel Max D. Aer, Kepala Operasional Kepolisian Papua*

Agus Alua, Ketua MRP, dan Para Anggota MRP

Decky Asmuruf, Sekretaris Gubernur Papua*

Frans Nikopas Awak, Camat Babo

Y. Berty Fernandez, Kantor Gubernur, Provinsi Papua

Deky Kawab, Deputy Bupati Bintuni

John Ibo, Presiden, Dewan Provinsial

Jimmy Demianus Ijje, Juru Bicara, DPRD, Irian Jaya Barat dan Para Anggota DPRD

Pak Mandagan, Bupati Manokwari

Pak Mandowen, Presiden Dewan Perwakilan Manokwari

Daud Mandown, Ketua DPRD, Irian Jaya Barat

Dr. Alfons Manibui, Bupati Bintuni

Pak Paquil, Wakil Bupati Bintuni

Kolonel Molosan, Deputy untuk Jendral Simbolon (selama Jendral Simbolon menjabat Pangdam Papua)

Bernard Nofuerbanana, Ketua Babo Adat

Lt. Daniel Pakiding, Kapolres Babo

Kapten Puryomo, Komando daerah militer

ML Rumadas, Deputy Interim Gubernur Irian Jaya Barat*

Jaap Solossa, Gubernur Provinsi Papua

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua

Kolonel Suarno, Direktur Keamanan Kepolisian Papua*

Brigjen Pol. Dody Sumantiawan, Kapolda Papua *

Frans A. Wospakrik, Wakil Ketua MRP

Irjen. Tommy Yacobus, Kapolda Papua

Mayjen Zamroni, Panglima Komando Daerah Militer

Pejabat pemerintah Kabupaten Bintuni

Ketua, Komite Keamanan

Direktur Perencanaan Manokwari, dan beberapa perwira senior Manokwari lainnya

Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat

H.E. Ralph Boyce, Duta Besar A.S. untuk Indonesia*

Karen Brooks, Director for Asian Affairs, National Security Council*

Christopher Camponovo, U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights & Labor

Marc L. Desjardins, Konsul Urusan Politik, Kedutaan A.S. di Jakarta

William A. Heidt, Konsul Ekonomi, Kedutaan A.S. di Jakarta

James M. Hope, Director, Education Office, USAID Indonesia

Richard Hough, Director of Programming, U.S. Agency for International Development (“USAID”)

Karin Lang, U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, Office of Indonesia and East Timor

Allan D. Langland, Deputy Director, U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, Office of Indonesia and East Timor

Jon D. Lindborg, Deputy Director, USAID

Office of Maritime Southeast Asian Affairs (Brian McFeeters, Deputy Director; Donald Mattingley, Indonesia Country Officer)

Anne Patterson, USAID

H.E. B. Lynn Pascoe, Duta Besar A.S. untuk Indonesia*

Maria Pica, Senior Advisor, U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights & Labor

Fred Pollock, Director, Natural Resources Management Program, USAID

Henry (“Hank”) M. Rector, First Secretary, Kedutaan A.S. di Jakarta

Michael Uyehara, Energy and Minerals Resource Officer, Kedutaan A.S. di Jakarta

Kurt van der Walde, Energy and Mineral Resources Officer, Kedutaan A.S. di Jakarta

Shari Villarosa, Konsul Ekonomi, Kedutaan A.S. di Jakarta

John Wegge, Advisor, Office of Decentralized Local Government, USAID

Holly Wise, USAID

Pejabat Pemerintah: Inggris

H.E. Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia*

H.E. Charles Humphrey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia*

Eleanor Kiloh, Second Secretary (Political), Kedutaan Inggris di Jakarta

Theresa O’Mahony, Second Secretary (Political), Kedutaan Inggris di Jakarta

Matthew Rous, Deputy Head of Mission, Kedutaan Inggris di Jakarta

Jonathan Temple, Kedutaan Inggris di Washington, D.C.

Pejabat Pemerintah: New Zealand

H.E. Chris Elder, Duta Besar, Kedutaan New Zealand di Jakarta

Pejabat Pemerintah: Cina

Ma Jisheng, Konsul (Politik), Kedutaan Cina di Jakarta

Tan Weiwen, Minister Counsellor (Economic and Commercial), Kedutaan Cina in Jakarta

Xu Qiyi, Second Secretary (Economic and Commercial), Kedutaan Cina di Jakarta

Penduduk Kawasan Kepala Burung Papua

Pak Biam, Camat Aranday, dan pimpinan desa Aranday

Neles Tebay, Pendeta Katholik Keuskupan Jayapura

Pimpinan desa Babo

Penduduk desa Aranday

Penduduk desa Onar Baru

Penduduk desa Saengga

Penduduk desa Tanah Merah, termasuk komite yang mengawasi dampak proyek Tangguh

Penduduk desa Taroy

Penduduk desa Tofoi

Penduduk desa Tomu/Ekam
Penduduk desa Weriagar/Mogotira

Lembaga Swadaya Masyarakat

American Center for International Labor Solidarity (Timothy Ryan, Program Director, Asia Region)

Amnesty International (Charles Brown; Lucia Withers)

Asia Foundation (Rudi Jueng, Assistant Director)

Pastor Paul P. Tan

Dr. M. Gemnafle

BPR Pt. Phidectama Jayapura (Bram Fonata, Director)

British Council (Wendy Lee, Social Development Advisor)

Center for Human Rights di RFK Memorial (Miriam Young; Abigail Abrash Walton)

Citizens International (John Wells)

CTRC (Bas van Helvoort, Executive Director)

Conservation International (Barita Oloan Manullang, Species Conservation Senior Specialist;

Jatna Supriatna, Executive Director and Regional Vice President for Indonesia;

Yance de Fretes, Papua Species Specialist; Iwan Wijayanto, Partnership Director)

Down to Earth (Liz Chidley)

ELSHAM (Aloysius Renwarin, Direktur; John Rumbiak)

Earthwatch (Coralie Abbott, Corporate Programmes Manager)

Eddy Ohoirwutun, Adat Consultant

FKIP Universitas Cenderawasih (Dr. Leo Sagisolo)

FOKKER (Yuvan Ledang, Kepala Komite Pengarah, Septer Menufandu, Sekretaris

Eksekutif, Budi Setiyauto, Sekretaris Eksekutif; Yul Chaidir, Komite Pengarah; Robert Mondosi, Komite Pengarah)

Human Rights Watch (Mike Jendrzeczyk)

IBLF, The Prince of Wales International Business Leaders Forum (Lucy Amis, Business and Human Rights Programme Manager)

Indonesia Human Rights Network (Edmund McWilliams)

Lembaga Penelitian, Analisis dan Pengembangan untuk Bantuan Hukum (LP3BH) (Yan Christian Warinussy, SH, Direktur Eksekutif)

International Committee of the Red Cross (Frank Sieverts, Assistant to the Head of the Regional Delegation, North America)

International Crisis Group (Sidney Jones, Indonesia Project Director; Kathy Ward, ICG Deputy Director)

International Labor Organization (Tony Freeman)

International Labor Rights Fund (Dr. Bama Athreya)

Komnas HAM Perwakilan Papua (Alberth Rumbekwan, Pemimpin Eksekutif)

LBH HAM Papua – Sorong (Sonratho J Marola, Direktur)

LP3AP – Jayapura (Selviana Sanggenafa, Direktur)

National Democratic Institute for International Affairs (Blair King)

The Nature Conservancy (Ian Dutton, Country Director for Indonesia; Titayanto Pieter, Conservation Partnerships Manager)

Dewan Presidium Papua (Thom Beanal, Willy Mandowen)

Proyek Pesisir (Maurice Knight, Chief of Party, Proyek Manajemen Sumber Daya Pesisir)

Pt. PPMA Jayapura (Edison Giay, Direktur)
Pusat Study HAM Universitas Islam Indonesia (Suparman Marzuki, Direktur)
Pusat Studi HAM Universitas Negeri Cenderawasih (Frans Reumi, Direktur)
TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign (Danny Bates)
UK Overseas Development Institute (Michael Warner)
US-ASEAN Council (John Phipps)
West Papua Association UK (Linda Kaucher)
Wildlife Conservation Society (Dr. Nicholas W. Brickle, Program Manager)
World Wildlife Fund (Heike Mainhardt; Benja Victor Mambai; Clive Wicks)
Yayasan Pengembangan Masyarakat (Decky Rumaropen, Direktur)

Sektor Swasta

AGI Security & Business Intelligence (Don Greenlees, Director, Research and Analysis)
Asian Development Bank (Edgar Cua, Country Director, Indonesia Resident Mission)
Chemonics (Jonathan Simon, Senior Manager)
Citigroup International (Michael Zink, Citigroup Country Officer, Indonesia)
Halliburton KBR (John G. Baguley, Project Manager)
International Finance Corporation (Juanita Darmono, Program Manager, Oil/Gas/Mining Linkages)
ISIS Asset Management (Robert Barrington)
JGC Corporation (Tadashi Asanabe, Project Director)
JMSB-KMSB-SIME Consortium (Ron E. Hogan, Project Director)
Kiani Kertas (Jend. TNI (Pur.) Luhut Panjaitan MPA, President Commissioner)
KJP, Okinari, Project Manager
Perform Project, RTI International (Ben Witjes, Senior PDPP Regional Advisor)
YIPD/CLGI (Center for Local Government Innovation) (LeRoy Hollenbeck, Director Business Development; Alit Merthayasa, Executive Director)

Institusi Internasional

United Nations Development Programme (Bo Asplund, UNDP Resident Representative in Indonesia; Shahrokh Mohammadi, Deputy Resident Representative; Gwi-Yeop Son, Senior Deputy Resident Representative; Kishan Koday, Program Officer-Environment Unit; Abdurrachman Syebubakar, Program Office-Community Initiative Unit; **Dra. Judith P.C. Simbara MSi, National Project Manager, Capacity 2015; Reintje Kawengian, Institutional Development Specialist, Capacity 2015)**
World Bank di Indonesia (Bert Hofman, Lead Economist; Andrew Steer, Country Director, Indonesia; Scott Guggenheim, Principal Social Scientist; **Wolfgang Fengler, Senior Economist)**
World Bank Support Office for Eastern Indonesia (Petrarca Karetji, Coordinator; Richard Manning)

Institusi Akademik di Papua

UNIPA (University of Papua, Manokwari) (Rector: Frans Wanggai and Dosen)
Universitas Cenderawasih (Frans A. Wospakrik, Rektor, dan Dewan Dosen; dan **B. Kambuaya, Rektor saat ini)**

Perseorangan

Mr. Herbert Behrstock, International Development Consultant

Admiral Dennis Blair, Ret. U.S. Navy, Chair of the Indonesia Commission, Center for Preventative Action, Council on Foreign Relations

Dr. Jonah Blank, Professional Staff Member, U.S. Senate Committee on Foreign Relations

Professor Michael M. Cernea, Advisor to BP on Resettlement of Tanah Merah

Mr. Hugh Dowson

Mr. Bennett Freeman, Principal, Sustainable Investment Strategies

Mr. Brigham Montrose Golden

Mr. Bara Hasibuan, Intern, U.S. House of Representatives International Relations Committee

Dr. Ayse Kudat, Penasihat BP untuk Pemukiman Ulang Tanah Merah

Ambassador Edward Masters, Chairman, U.S.-Indonesia Society

Ms. Gabrielle K. McDonald, Penasihat HAM untuk Freeport McMoRan

Mr. Octovianus Mote

Mr. David Phillips, Senior Fellow and Deputy Director of the Center for Preventative Action, Council on Foreign Relations

Mr. Ed Pressman

Mr. Gare Smith, Foley Hoag

Reverend Socrates Yoman, President of the Fellowship of Baptist Churches

LAMPIRAN 2

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PEGAWAI

TAHAP	DESKRIPSI	WAKTU/ PERIODE	KETERANGAN
Tahap I	<p>Pembahasan Jika pegawai memiliki keluhan yang ingin disampaikan (selanjutnya disebut Pengeluh), dia diharapkan untuk terlebih dahulu membahas keluhan tersebut langsung dengan orang atau unit yang terkait (selanjutnya disebut Yang Diadukan).</p>	Segera	<p>Keluhan dapat disampaikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai terhadap supervisornya - Supervisor terhadap bawahannya - Pegawai terhadap unit atau departemen tertentu dalam perusahaan/kontraktor. - Pegawai terhadap KJP - Pegawai terhadap BP
Tahap II	<p>Pelaporan Keluhan: Jika resolusi tidak dapat dicapai melalui pembahasan langsung terkait keluhan yang disampaikan Pengeluh dan yang bersangkutan tidak puas dengan hasil pembahasan tersebut, Pengeluh diharapkan segera melaporkan keluhannya melalui prosedur tertulis.</p> <p>Keluhan harus ditulis pada kartu keluhan yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak keluhan yang tersedia di setiap kantor subkontraktor dan tempat-tempat umum lainnya.</p> <p>Jika Pengeluh buta huruf, dia dapat meminta bantuan pihak lain untuk menuliskan/membacakan keluhannya, dan harus menandatangani kartu keluhan terkait.</p>	7 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Komite yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan pegawai (selanjutnya disebut Komite) akan dibentuk di setiap subkontraktor. Komite pusat juga akan dibentuk untuk kontraktor utama KJP yang terdiri dari perwakilan KJP tetap dan anggota ad hoc dari setiap Komite (selanjutnya disebut Komite Pusat KJP). <p>Kotak keluhan akan dibuka setiap hari oleh anggota Komite dan disaksikan oleh perwakilan pegawai dan perusahaan. Jika perwakilan pegawai yang ditunjuk tidak bisa menyaksikan pembukaan kotak keluhan, dia dapat menunjuk pegawai lain untuk menggantikannya.</p> <p>Penyelesaian sengketa/perilaku terkait hubungan industri yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan akan diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan dimaksud. Dalam hal ini, Komite yang terkait harus menyerahkan laporan ke Komite Pusat KJP.</p>

<p>Tahap III</p>	<p>Investigasi dan Klarifikasi Anggota Komite bertanggung jawab atas investigasi dan klarifikasi keluhan yang disampaikan oleh Pengeluh. Jika diminta, Komite akan mengirimkan pemberitahuan keluhan kepada Yang Diadukan.</p>	<p>3 hari</p>	<p>Pemberitahuan keluhan harus ditandatangani oleh bagian personalia perusahaan dan setidaknya seorang anggota Komite.</p> <p>Jika Yang Dikeluhkan adalah unit atau departemen dalam perusahaan, pemberitahuan keluhan akan dialamatkan kepada supervisor/manajer yang terkait yang bertanggung jawab atas unit/departemen itu.</p> <p>Jika keluhan disampaikan kepada subkontraktor lain di luar tempat kerja yang terkait, Komite akan meneruskan keluhan itu kepada Komite Pusat KJP. Komite Pusat KJP selanjutnya akan menyerahkan pemberitahuan kepada supervisor/manajer departemen atau unit dari Yang Diadukan.</p>
<p>Tahap IV</p>	<p>Tanggapan Tertulis dari Yang Dikeluhkan Selama proses klarifikasi, Yang Diadukan harus menyerahkan tanggapannya kepada Komite selambat-lambatnya dua hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan keluhan tertulis.</p>	<p>2 hari</p>	<p>Tanggapan atas keluhan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan yang selanjutnya akan dicatat oleh anggota Komite.</p>
<p>Tahap V</p>	<p>Tanggapan atas Keluhan Komite akan meneruskan tanggapan atas keluhan kepada Yang Diadukan berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi. Selanjutnya, satu dari tindakan berikut akan diikuti (tindakan diurutkan berdasarkan kemungkinan terjadinya):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan dinyatakan selesai (dengan kesepakatan semua pihak). 2. Komite memfasilitasi pertemuan antara Pengeluh dan Yang Diadukan untuk membahas solusi keluhan. 	<p>3 hari</p>	<p>Jika Pengeluh menerima solusi atas keluhannya, maka diperlukan kesepakatan yang menyatakan bahwa keluhan telah diselesaikan. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh Pengeluh, Yang Diadukan dan Komite.</p> <p>Jika Yang Diadukan adalah pegawai KJP, keluhan akan ditangani langsung oleh Komite Pusat KJP.</p> <p>Penyelesaian sengketa/perilaku terkait hubungan industri yang</p>

	3. Keluhan akan diselesaikan pada Tahap Mediasi Internal oleh Komite Pusat KJP.		diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan akan diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan dimaksud. Dalam hal ini, Komite yang terkait harus menyerahkan laporan ke Komite Pusat KJP.
Tahap VI	<p>Mediasi Internal Jika keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat subkontraktor, maka penyelesaiannya akan dibawa ke proses mediasi internal</p> <p>Mediasi akan disediakan oleh Komite Pusat KJP untuk membantu penyelesaian keluhan.</p>	5 hari	<p>Proses mediasi dihadiri oleh Pengeluh, Yang Diadukan dan anggota Komite serta Komite Pusat KJP. Mediasi juga akan dihadiri oleh BP-Tanggung LNG Project Manpower and Industrial Relations Manager (atau pewakilannya) untuk memberikan saran-saran terhadap keluhan tersebut.</p> <p>Proses ini merupakan proses terakhir dalam proses penyelesaian keluhan internal sebelum melibatkan pihak eksternal.</p>
Tahap VII	<p>Mediasi Eksternal Jika proses penyelesaian keluhan yang difasilitasi oleh Komite Pusat KJP gagal menghasilkan solusi, Yang Diadukan dan/atau perusahaan dapat meminta agar pihak ketiga memfasilitasi penyelesaian keluhan tersebut.</p> <p>Jika tahap ini juga gagal mencapai penyelesaian, Yang Diadukan dan/atau perusahaan dapat meneruskan keluhan tersebut untuk mendapatkan penyelesaian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.</p>	Sesuai proses eksternal	<p>Pihak ketiga meliputi pemerintah (termasuk Departemen/Badan Tenaga Kerja), pengacara, konsultan relasi industri dan pihak terkait lainnya.</p> <p>Penyelesaian sengketa/perilaku terkait hubungan industri yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan akan diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan dimaksud.</p>

TABLE OF CONTENTS

Page

LAMPIRAN 3

JADWAL DEMOBILISASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

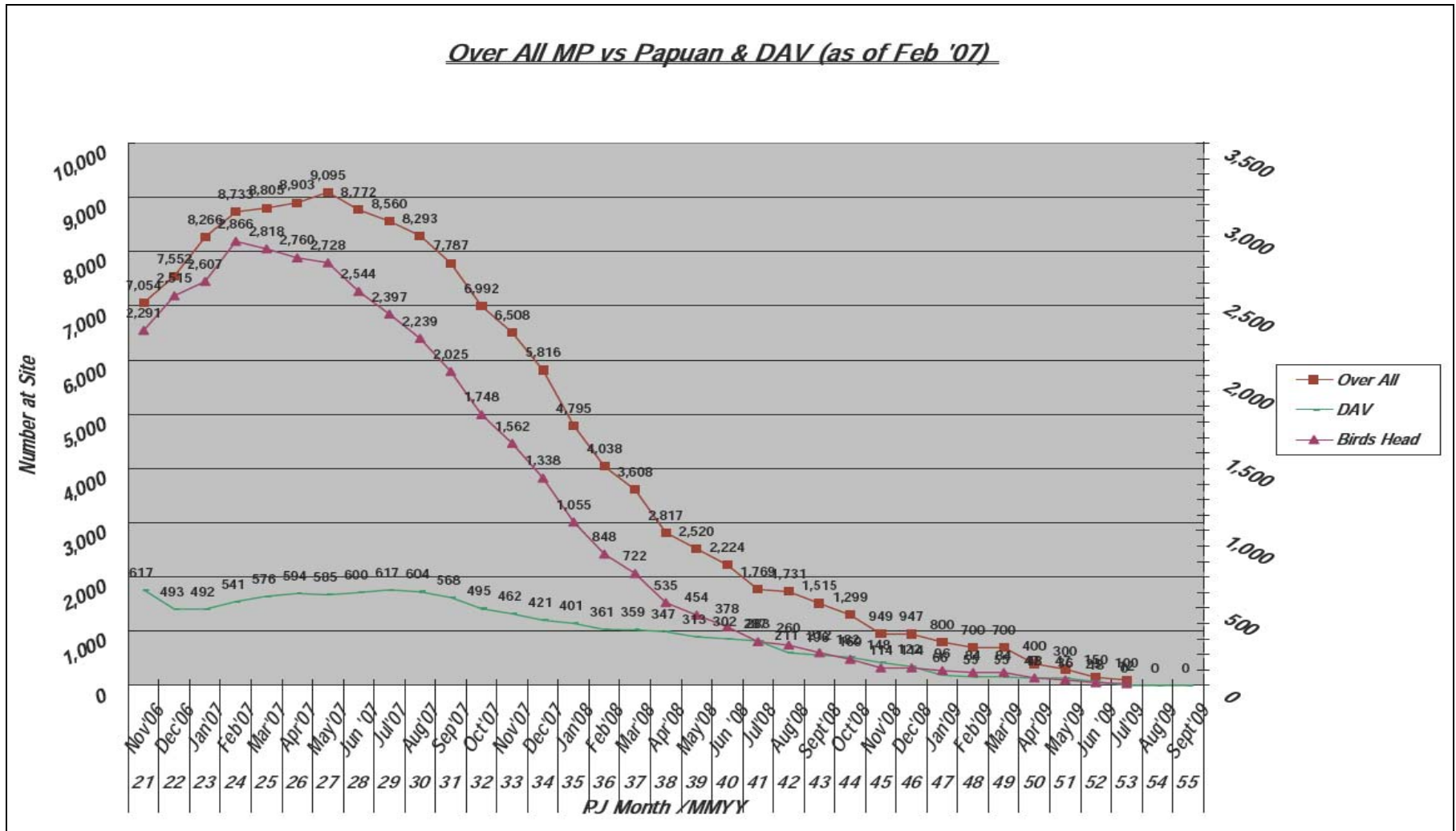
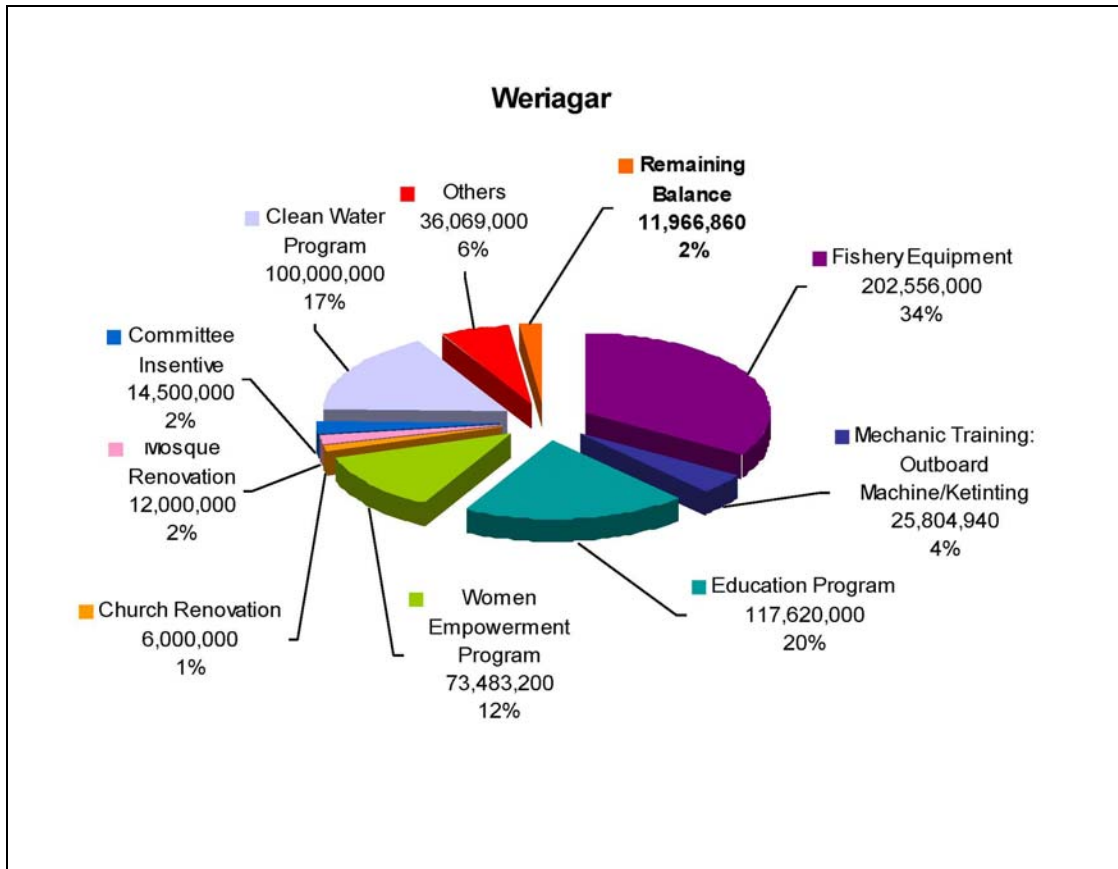
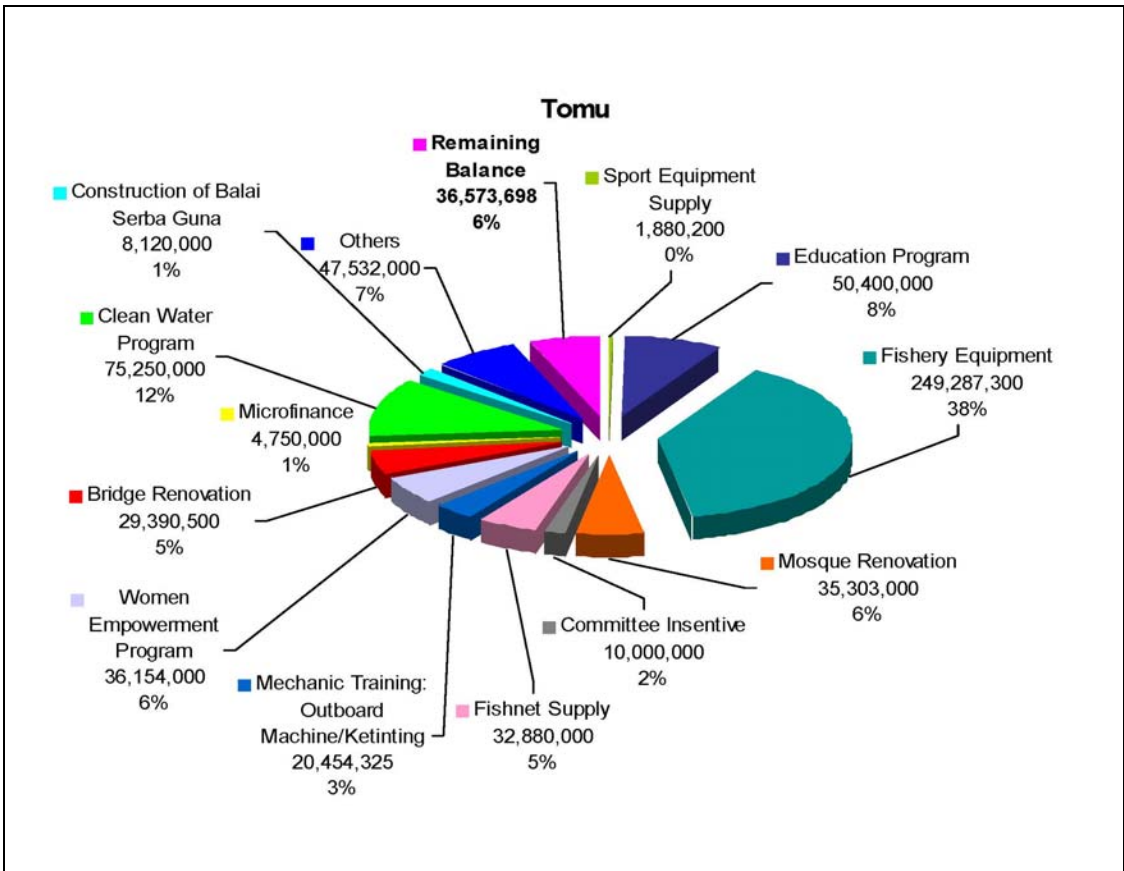
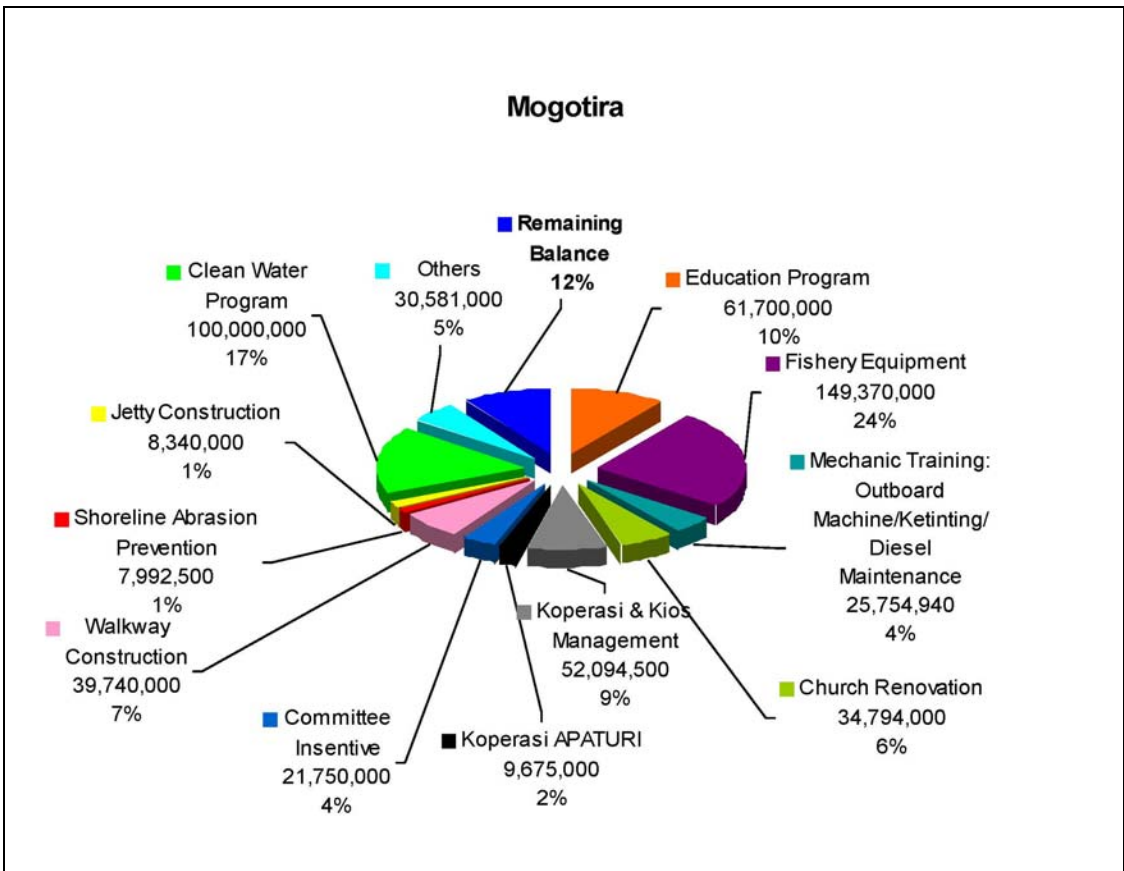


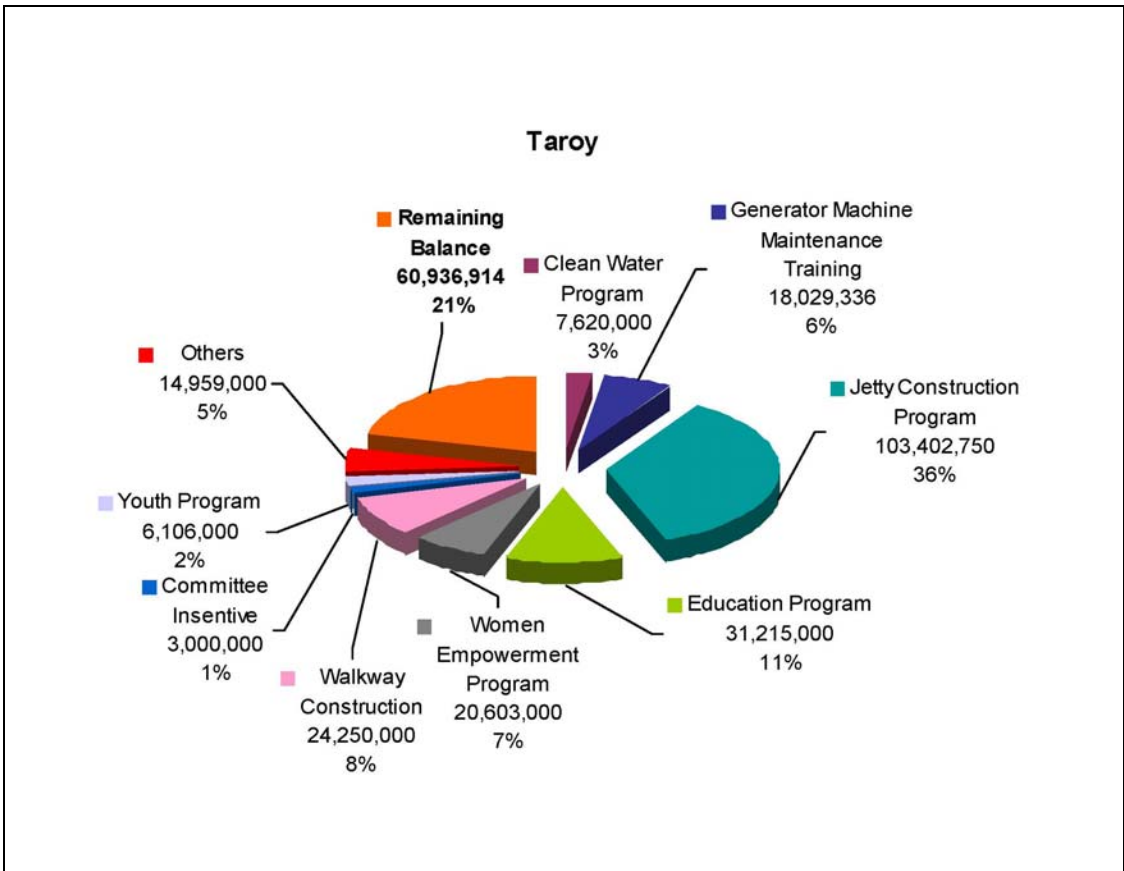
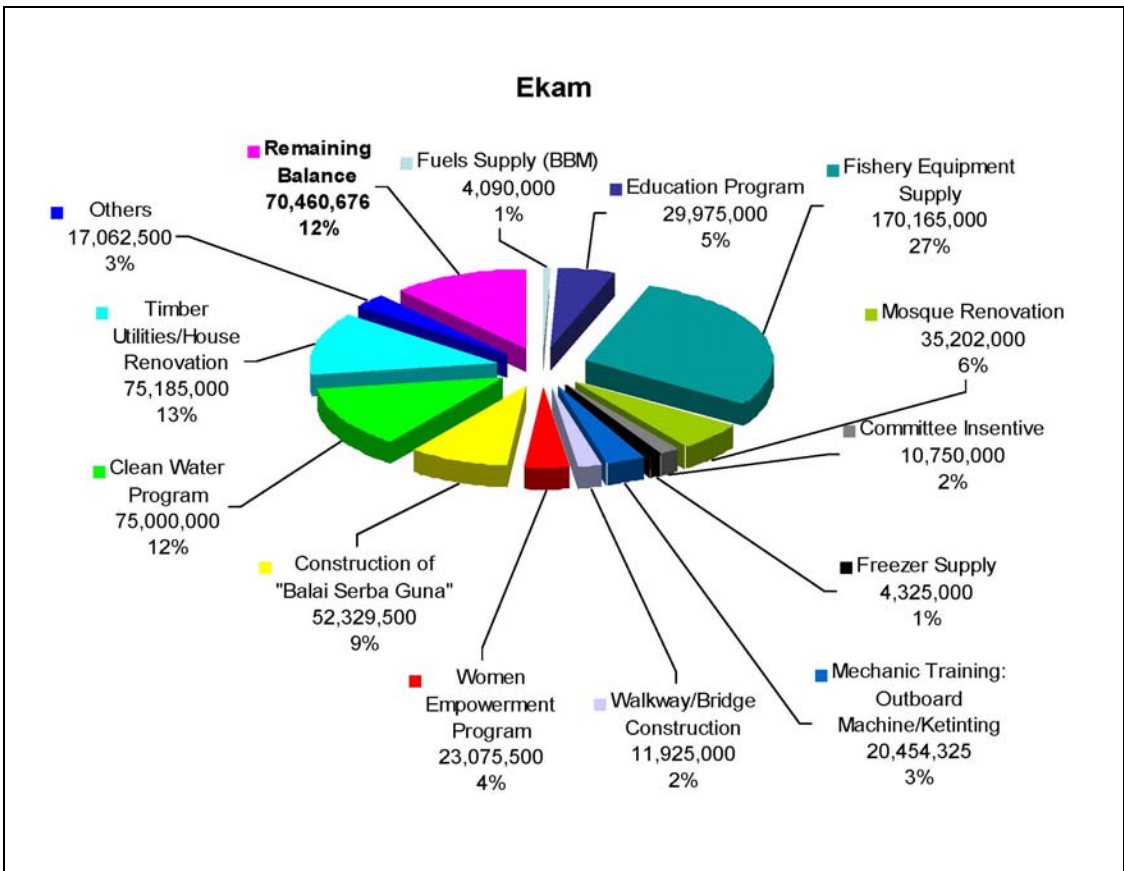
TABLE OF CONTENTS

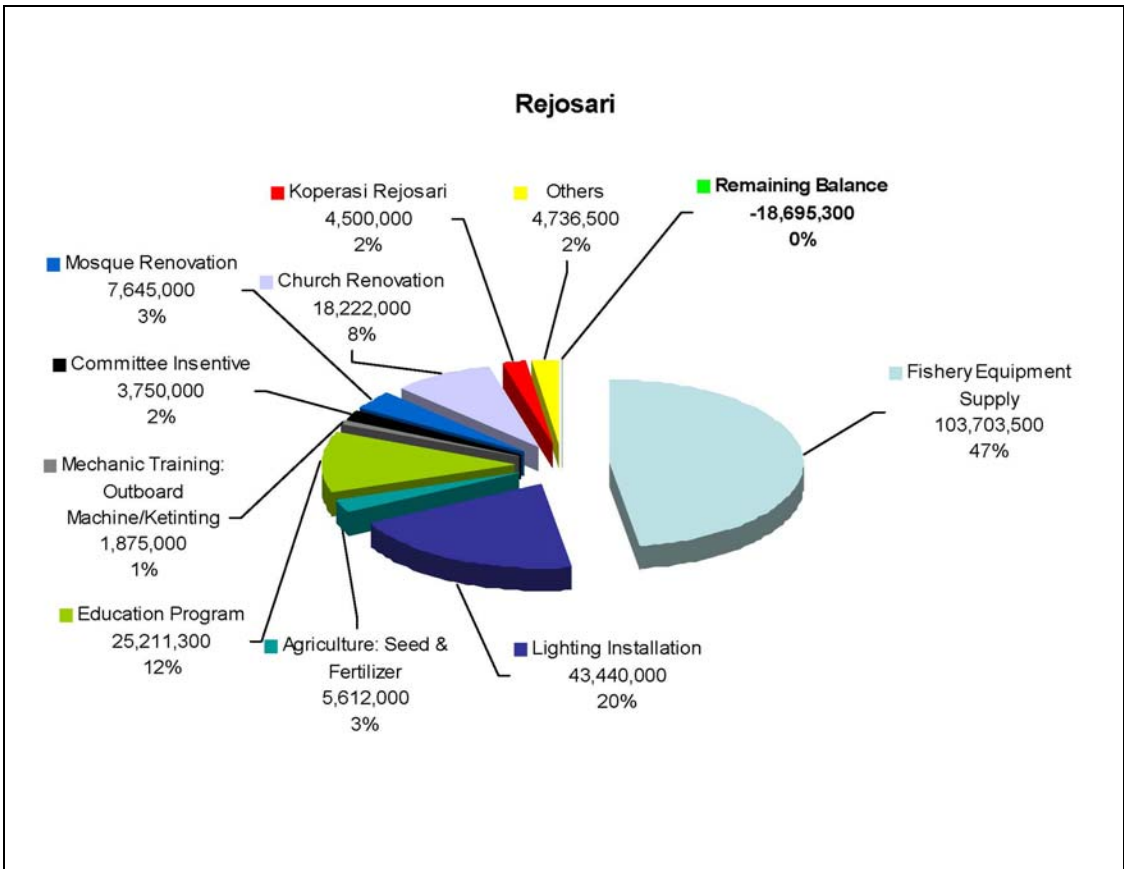
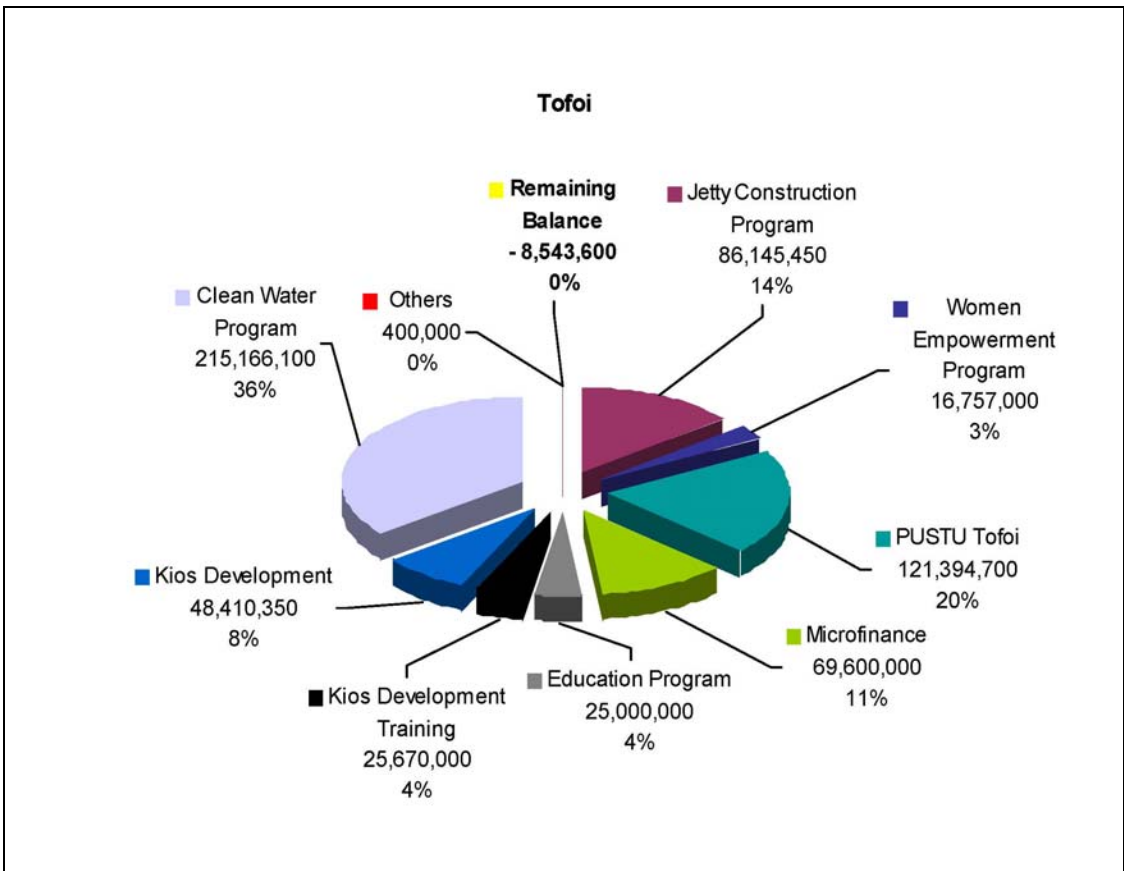
LAMPIRAN 4

PEMANFAATAN KUMULATIF RENCANA TINDAKAN KOMUNITAS OLEH DAV (DALAM RUPIAH, BELUM TERMASUK TAHUN BERJALAN)

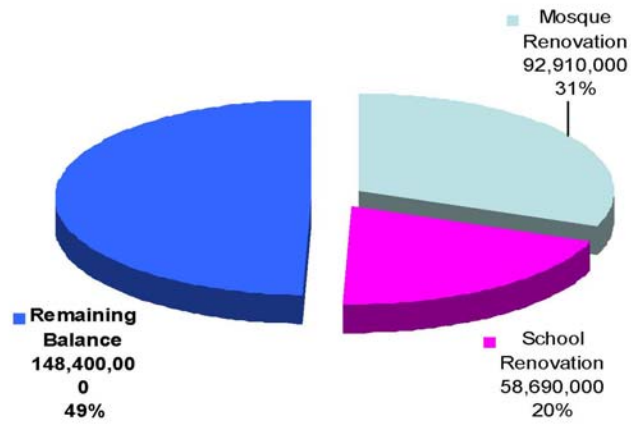








Otoweri/Tomage



Irarutu III - Babo

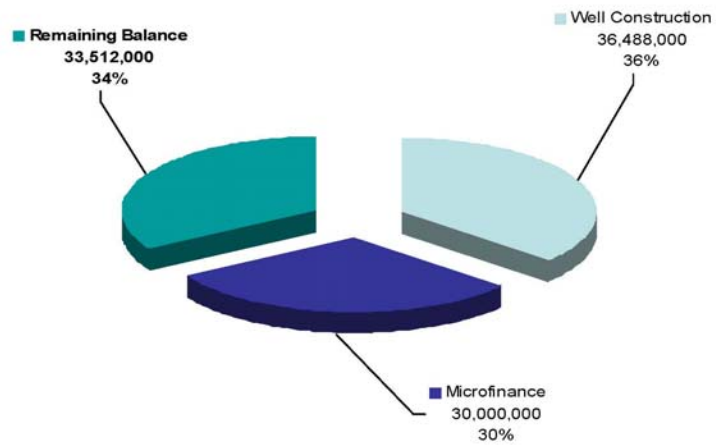


TABLE OF CONTENTS

Page

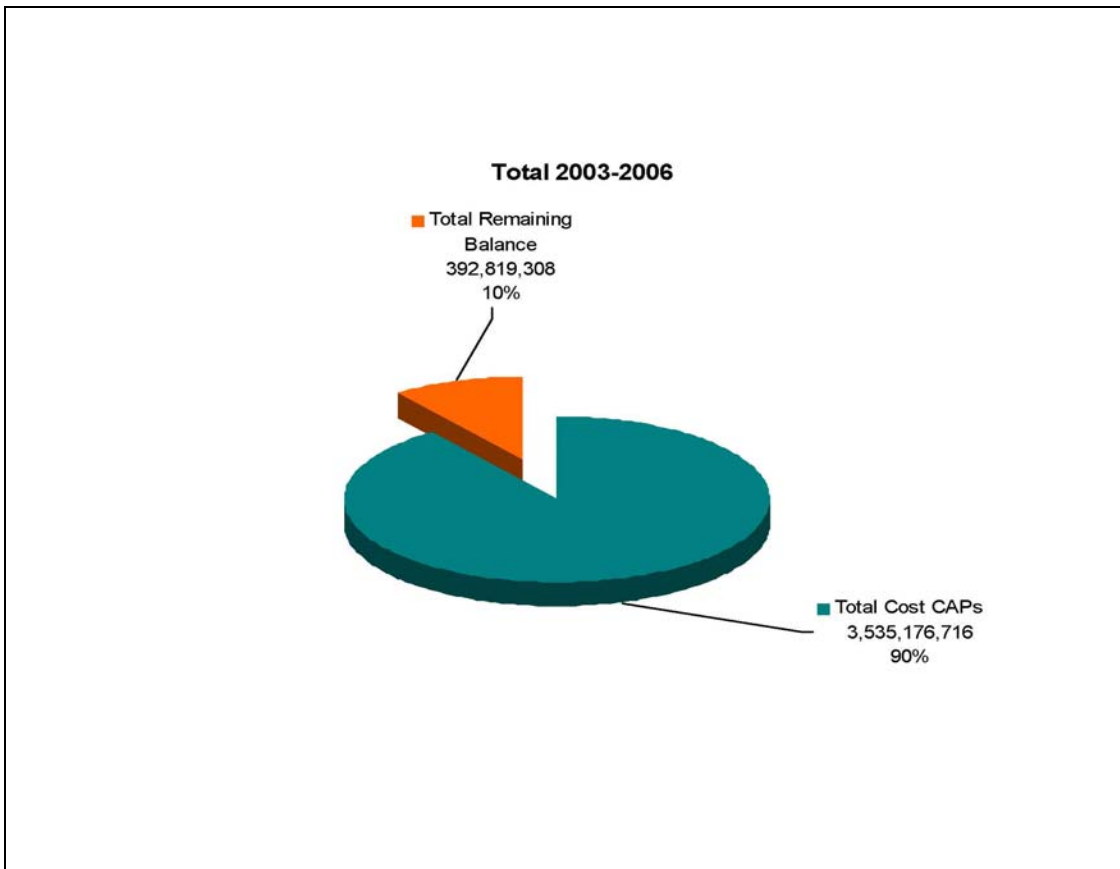


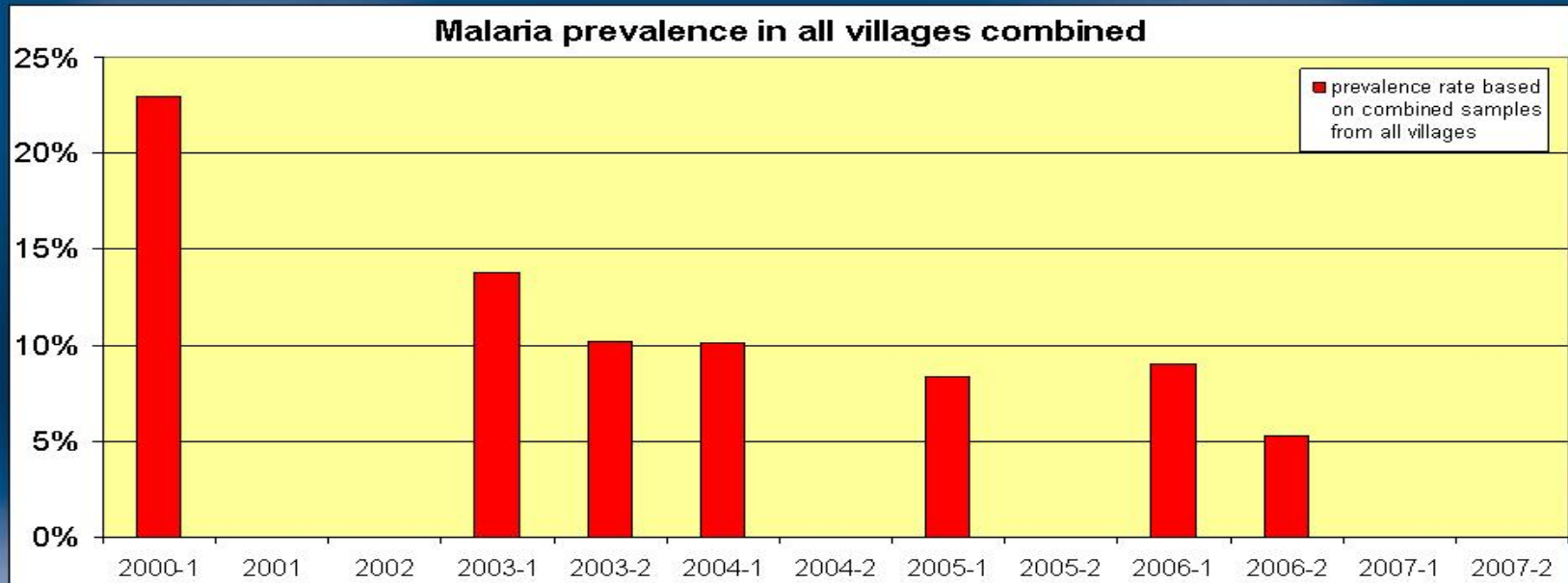
TABLE OF CONTENTS

Page

LAMPIRAN 5

STATISTIK PROGRAM PEMASARAN SOSIAL TCHU

Reduction in malaria prevalence in Teluk Bintuni since 2000



The prevalence rate of all villages combined dropped from 23% in 2000 to 5% in 2006



BP-TCHU Malaria Control Program



Diarrhoea Case-Fatality Rates: Bintuni Bay 2003-2006

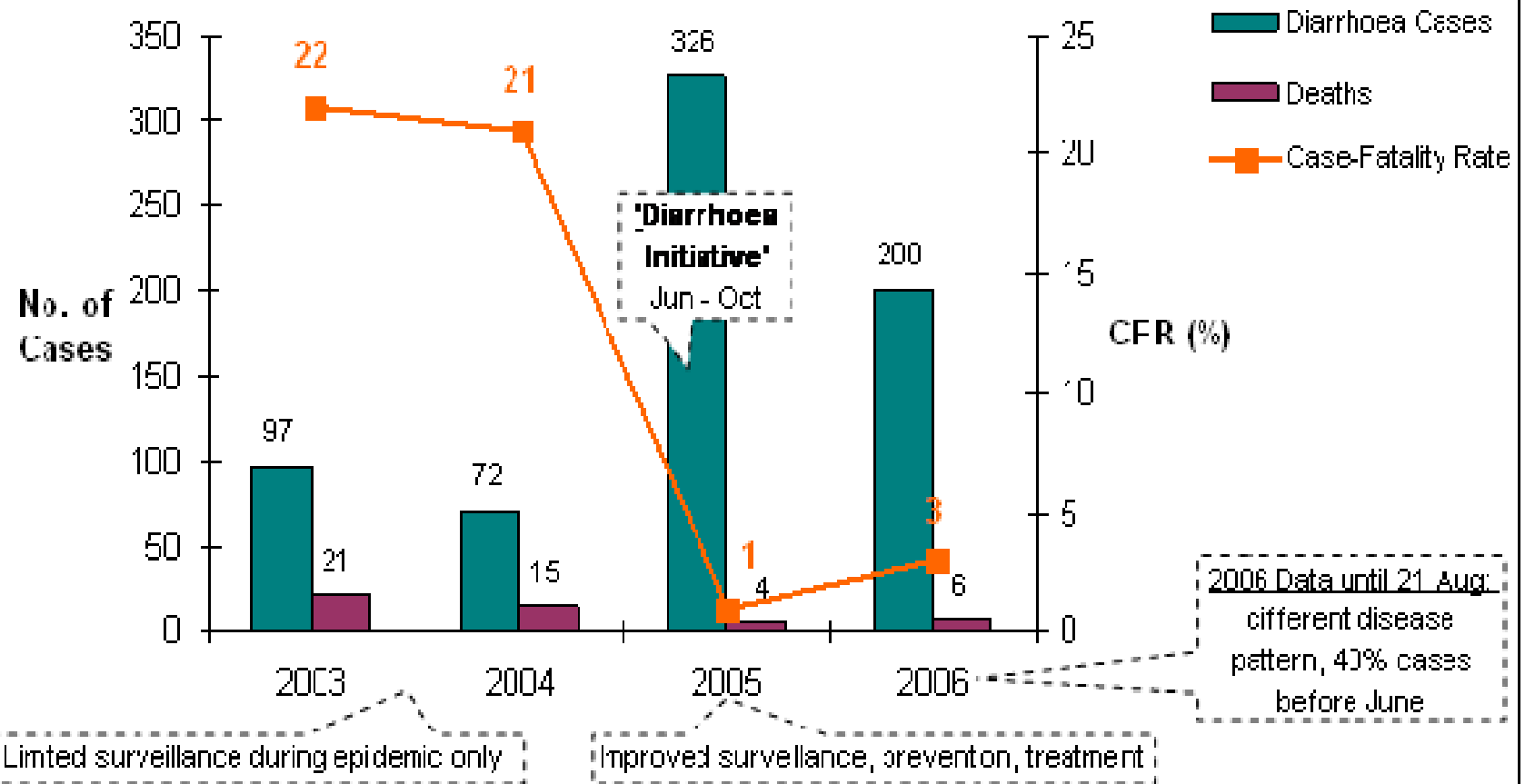


TABLE OF CONTENTS

Page

LAMPIRAN 6

RENCANA TINDAKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TANGGUH

KOMPONEN BAP	SASARAN PROGRAM	MITRA STRATEGIS UTAMA	STATUS PROGRAM
Balai Konservasi Sumber Daya dan Pelatihan (CTRC)	Menyediakan pelatihan konservasi praktis dan terapan bagi kelompok lintas sektoral yang luas, termasuk memberdayakan organisasi masyarakat tertinggal setempat	Nature Conservancy, Conservation International, Wildlife Conservation Society, World Wide Fund for Nature, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Kehutanan, Dirjen Konservasi, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan BIOTROP (SE Asia Centre for Tropical Biology).	CTRC sekarang merupakan lembaga independen dan akan mengerjakan program 5 tahunan dengan UNEP mulai Q2 2007. Tangguh setuju untuk menyediakan dana awal untuk program penyiapan CTRC sebelum tersedia dana UNEP.
Atlas Penggunaan Lahan Teluk Bintuni	Dikembangkan dengan masukan signifikan dari komunitas, universitas dan pemerintah Papua; digunakan dalam program pendidikan guru Teluk Bintuni yang disponsori BP (membantu mendidik 900 anak) dan sebagai alat bantu penggunaan lahan untuk badan perencanaan pemerintah daerah.	USAID CRMP (Coastal Resources Management Partnership), UNIPA (Universitas Negeri Papua), badan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, The Nature Conservancy, Conservation International, dan sebagainya.	Diselesaikan tahun 2004, disebarakan ke sekolah-sekolah di Bintuni dan kantor perencanaan pembangunan. Juga digunakan sebagai alat Bantu perencanaan untuk Strategi Diversifikasi Pengembangan Pemerintah Papua dan UNDP 2015 DGS.
Rencana Pengelolaan Cadangan Hutan Bakai Bintuni	Dikembangkan untuk hutan bakau yang penting bagi dunia; kebutuhan masyarakat setempat diperhatikan dalam proses perencanaan untuk menjamin program yang dimiliki dan dihargai oleh masyarakat setempat.	The Nature Conservancy, Institut Pertanian Bogor (IPB), kantor Kementerian Kehutanan setempat, UNIPA (Universitas Negeri Papua)	Diselesaikan pada Q3 2005. Pada Q1 2006, Kementerian Kehutanan mengadopsi Rencana ini sebagai Rencana Nasional resmi.
Penilaian Kesehatan Perikanan Laut	Alat penilaian risiko untuk BP yang juga memberi data penting dan analisis yang berguna bagi	UNIPA (Universitas Negeri Papua) dengan bantuan teknis dari World Wide Fund for Nature, Departemen Perikanan	Diselesaikan pada Q1 2005. Akan digunakan untuk meningkatkan

Bintuni	penyelesaian Rencana Pengelolaan Teluk Bintuni secara berhasil.	Papua dan pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat.	program kelautan BP di Teluk Bintuni di masa mendatang.
Survei Flora Fauna di Lokasi LNG Tangguh	Survei Flora Fauna di Lokasi LNG Tangguh 2002 mengisi kesenjangan data ilmiah yang dilaporkan oleh lebih dari 90 ilmuan ternama pada Lokakarya Penetapan Prioritas Konservasi Keanekaragaman Hayati Irian Jaya tahun 1997.	PT Hatfindo dan Indo-Pacific Conservation Alliance (IPCA).	Survei pertama diselesaikan pada Q4 2003. Survei berikutnya dijadwalkan Q1 2007.
Program Energi dan Keanekaragaman Hayati	Program monitoring dan evaluasi keanekaragaman hayati untuk menguji alat bantu metrik Energy Biodiversity Initiative (EBI) di lapangan.	Tim Lingkungan BP Tangguh.	Komponen teresterial sudah rampung. Sekarang menunggu komponen kelautan yang disediakan oleh APEX/UNIPA sebagai bagian dari Studi Mamalia Laut.
Dana Konservasi Papua	(1) Secara langsung mengelola sumberdaya dan menentukan warga Papua penerima, membentuk berbagai kecakapan (penggalangan dana, pengelolaan dana, review proposal proyek) dan (2) bertindak sebagai distributor hibah, menyediakan dukungan yang diperlukan untuk organisasi konservasi lokal yang bernilai.	Conservation International dan organisasi lain yang berbasis di Papua.	Masih berjalan. Lokakarya terakhir Q2 2006.